

k a l i m a t u n

Sawwa'

Sahaja dan Setara dalam Keragaman - *Modest & Equal in Diversity*

Multikultural

sebagai Anugerah

Pluralisme Wacana & Praktik

Keberagaman

Komunitas Keagamaan di Surakarta

Dari Redaksi

Multikultural adalah Anugerah. **3**



Kalimah Utama

“EKSTREMITAS KLAIM”, QUO VADIS PENGAKUAN PLURALITAS
KEBERAGAMAAN? (Riset Redaksi),

oleh **Fajar Riza Ul Haq. 4**

Laporan: KEBERAGAMAN KOMUNITAS
KEAGAMAAN DI SURAKARTA (*Tim Laput*). **8**

Artikel

Pluralisme: Wacana dan Praktik, oleh **Jabatin**

Bangun. 12

Tantangan Humanitas Baru Dalam
Pendidikan Multikultural, oleh **Zakiyuddin**

Baidhaw. 15

Kolom

MULTIKULTURALISME SEBAGAI ANUGERAH Memperkaya Spiritualitas dan
Iman,

oleh **Musa Asy'ari. 18**

Konsep Wahdat al-Adyan ANTARA MONO DAN
MULTI, sebuah renungan,

oleh **Wawan Kardiyanto. 21**



Profil

FARID MAKRUUF, Perlu Komitmen Menjadi Seorang Muslim, **Rif'atul Khoiriyah. 25**

Hasil Penelitian

PURPUR SAGE, JALAN REKONSILIASI MELALUI INSTITUSI LOKAL, **Fajar Riza Ul
Haq. 28**

Hasil Diskusi

TANTANGAN Keadilan Sosial DALAM MASYARAKAT MUSLIM, **Asih Istikomah. 30**

Kalimah Berita 34-37

Feature Budaya

PASAR KLIWON, Perkampungan Etnis Arab di kota Solo, **Ali Sadli. 38**

Muhibah

Keadilan Gender Dalam Perspektif Agama Dan Budaya Masyarakat, **Rif'atul Khoiriyah. 41**



Cara mendapatkan Buletin **KALIMATUN SAWA'** : Kirimkan identitas institusi/person/media Anda beserta alamat, insya-Allah akan kami kirimkan gratis. Informasi yang kami muat di Buletin ini dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebutkan sumber. Apabila Anda memiliki informasi/ide tentang budaya dan perubahan sosial yang perlu disebarluaskan ke masyarakat, silahkan kirim insya-Allah kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat : **Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (Center for Cultural Studies and Social Change)**, Jl. A. Yani 1, Pabelan, Surakarta 57102, INDONESIA Telp. 62(0271)717417 ext. 191, 158; fax. 62(0271)715448, email: psb_ums@hotmail.com., **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.**

SUSUNAN PENGELOLA KALIMATUN SAWA': **Pemimpin Umum:** Yayah Khisbiyah, **Pimpinan Redaksi:** M.Thoyibi, **Redaktur Ahli:** Musa Asy'arie, Darajat AR., Mh. Zaelani Tammaka, Zakiyuddin Baidhaw, **Redaktur Pelaksana:** Wawan Kardiyanto, **Sekretaris:** Rif'atul Khoiriyah, **Keuangan:** Dwi Setyaningsih, **Sidang Redaksi:** Almuntaqo Zain, Slayer, Ali Moh. Sadli, Fajar Riza Ul Haq, Asih Istikomah, **Design Lay-out & Tata Letak:** Awan Lembayung, **Sirkulasi:** Farid Darmawan.



Pasti ada alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai suku-bangsa dengan kekhasan masing-masing, sebagaimana halnya Tuhan menciptakan keunikan informasi genetik (DNA), sidik jari dan sorot mata setiap individu.

Salah satu rahasia yang dikabarkan oleh Tuhan kepada manusia di balik penciptaan manusia dalam berbagai suku-bangsa adalah "*li ta`ârafû*" yang sering diterjemahkan menjadi "untuk saling mengenal". Ungkapan "*ta`ârafû*" merupakan bentuk infleksi dari kata dasar "*`arafa*" dengan wazan "*tafâ`ala*" yang memiliki pengertian resiprokal, yang sering diterjemahkan menjadi "saling tahu", "saling mengetahui", "saling mengenal", "saling memahami" atau "saling mengerti". Kata-kata lain yang memiliki pengertian hampir sama dan bisa diinfleksikan serupa adalah "*ta`âlamû*" dari kata dasar "*`alima*" atau "*tafâhamû*" dari kata dasar "*fahima*".

Yang perlu dikaji adalah bahwa Tuhan secara sengaja memilih diksi "*ta`ârafû*" daripada leksika lainnya, dan pertanyaan yang dapat diderivasi dari pemilihan diksi itu adalah apakah tafsir terhadap ungkapan "*ta`ârafû*" bersifat tunggal dan apakah pengertian yang terkandung dalam konsep tersebut terbatas pada suatu ranah tertentu.

Sebutan "*`arif*" bagi para sufi menunjukkan bahwa makna kata dasar "*`arafa*" lebih dari sekedar mengetahui secara kognitif, dan barangkali alasan itu pulalah yang menyebabkan penggunaan kata "*arif*" dalam bahasa Indonesia

Multikultural sebagai Anugerah

seringkali disejajarkan atau dikombinasi dengan kata "*bijaksana*". Para sufi disebut arif karena mereka dianggap mengetahui sesuatu tidak hanya pada tingkat intelektual atau eksperiensial, melainkan sampai ke tingkat "*ma`rifat*", yaitu mengerti "*hakikat*" sesuatu dalam realitas ultimanya. Itulah sebabnya, terdapat ungkapan populer di kalangan sufi "*man`arafa nafsahu fa qad`arafa rabbahu*" (barangsiapa mengerti dirinya sendiri, niscaya dia mengerti Tuhannya) karena bagi mereka untuk dapat mengerti tentang Tuhan tak cukup dengan spekulasi intelek dan persepsi inderawi, melainkan harus menggunakan modus intuitif (*`irfanî*).

Bila demikian halnya, maka keanekaragaman jelas lebih dari sekedar diskursus atau wacana, melainkan bagian dari bentangan "ayat kauniyah", sebagai "*system of signs*" (sistem tanda) yang perlu dipelajari oleh sekalian umat manusia. Bila demikian halnya, maka pengertian "*li ta`ârafû*" meliputi suatu spektrum makna yang

tidak hanya berada dalam domain kognitif, melainkan juga mencakup domain afektif dan psikomotorik, sehingga "*li ta`ârafû*" mencakup rentang dari aspek pengetahuan, pandangan atau persepsi, perilaku, dan bahkan "ideologi".

Dengan demikian, pengertian yang dapat diambil dari "*li ta`ârafû*" adalah bahwa keanekaragaman merupakan sesuatu yang perlu diketahui (dalam ranah kognitif), bahwa keanekaragaman merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi atau dihargai (dalam domain afektif), dan bahwa keanekaragaman merupakan sesuatu yang perlu dijalani (dalam domain psikomotorik). Konsekuensinya adalah bahwa "*ta`ârafû*" merupakan sesuatu yang "*ma`rûf*", yaitu bahwa terdapat kebajikan di dalam bentuk-bentuk tindakan yang merupakan ekspresi dari "*ta`ârafû*", baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Satu pelajaran kunci yang dapat diambil dari keanekaragaman adalah, setiap komunitas, baik "*syu`ûban*", "*qabâila*", maupun "*jama`ah*" adalah setara dengan yang lain. Tak ada komunitas yang lebih unggul dalam arti sesungguhnya atas komunitas lainnya. Kekhasan suatu komunitas, baik secara fisik, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya hanyalah bagian dari teks yang perlu saling dikaji. Harga sejati setiap "*nafs*" (individu) atau komunitas terletak pada takwa masing-masing.

Akhirnya, mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan bersama dengan cara-cara yang baik bisa jadi adalah suatu "ijtihad sosial"; dan selebihnya "**wallâhu a`lam**".

“EKSTREMITAS KLAIM”, QUO VADIS PENGAKUAN PLURALITAS KEBERAGAMAAN?

(Riset Redaksi)

*“The challenge of relations between
and among people of different reli-
gious and cultural traditions is moving
to the top of the agenda”*

(Diane Eck)

Karya monumental *al-Milal wa al-Nihal* (1128) yang ditulis al-Shahrastani pada abad 12 merupakan dokumentasi penting karena memuat pandangan obyektif-ilmiah seorang tokoh Ilmu Kalam (teologi Islam) terkemuka beraliran Ash’ariah. Kelebihan kitab ini terletak pada keluasan informasi mengenai mazhab-mazhab teologi Islam, sekte-sekte agama lain serta keberadaan aliran-aliran filsafat Yunani maupun Islam. Karya ini mengabadikan apresiasi satu sudut pandang tertentu terhadap keragaman aliran pemikiran maupun sekte keagamaan yang menjamur pada kala itu. Bagi penulis, *al-Milal wa al-Nihal* merupakan potret sosiologi gerakan-gerakan pemikiran keagamaan yang tumbuh subur di tengah iklim metropolis peradaban Islam. Etnografi aliran-aliran teologis tersebut membentangkan kenyataan adanya pengakuan kebebasan untuk memilih corak pemahaman bahkan sekte teologis sekalipun.

Pada sisi lain, pergesekan pemahaman keislaman yang bersifat *amali* (praktis) dengan keragaman konteks sosio-kultural masyarakat Muslim memicu perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan keagamaan lokal. Dalam studi fikih, *Bidayat al-Mujtahid* yang disusun Ibn Rusyd telah memahatkan

sejarah pluralitas pemahaman keagamaan dalam khazanah keislaman. Sebagai salah satu rujukan kitab fikih klasik, kitab ini menguraikan problematika hukum Islam dari berbagai sudut pandang mazhab fikih, baik yang dikategorikan sebagai *qaul jumhur* (pendapat mayoritas/dominan) sebagai *main-stream* maupun *qaul akhar* (baca: *the other/the second opinion*) yang dipandang minoritas. Sadar atau tidak, karya ini merintis multikulturalisme fikih yang membuka jendela demokratisasi beragama dalam menentukan pilihan mazhab. Pendekatan yang dipakai Ibn Rusyd jelas berusaha menegaskan eksistensi arus “ekstremitas klaim” mazhab yang

mengusung ego otentisitas.

Meski *al-Milal wa al-Nihal* dan *Bidayat al-Mujtahid* telah mengabarkan bahwa betapa narasi panjang sejarah pemikiran Islam diwarnai aliran-aliran pemikiran dan mazhab keagamaan yang heterogen, namun “ekstremitas klaim” mazhab selalu muncul menginterupsi multikulturalisme ekspresi kesalehan untuk kemudian mengeras sebagai arus dominan yang lahir dari perselingkuhan kepentingan politik dan dominasi wacana agama. Dialektika politik dan agama inilah yang melandasi sekaligus mengurai akar tragedi *mihnah* (inkuisisi) oleh penguasa Abasiyyah (al-Makmun, al-Mu`tashim, dan al-Wastiq) terhadap pemuka fikih, ahli hadis, hakim dan pejabat negara yang meyakini “keabadian al-Quran”. Sejarah pun mencatat, Ahmad Ibn Hanbal merupakan

salah seorang korban intimidasi kepentingan politik atas nama wacana agama. Dalam perspektif kritik nalar sejarah, terungkap bahwa kebijakan *mihnah* yang menimpa Ibn Hanbal serta kalangan yang menentang paham “kemakhlukan al-Quran” yang menjadi pegangan birokrasi penguasa Abasiyyah tidak bisa dilepaskan dari dampak pemihakan argumentasi teologis Ibn Hanbal terhadap rezim Umayyah ketika berkuasa.

Arus balik hegemoni tekstualisme Islam pasca *mihnah* meninggalkan *atsar* (bekas) mendalam terhadap sistem pengetahuan dan kesadaran keberagaman masyarakat Muslim dewasa ini. Kondisi yang mengemuka ialah perbedaan pemahaman keagamaan dan kemajemukan ekspresi corak kesalehan pada akhirnya tidak mendapat tempat akomodasi dalam pluralitas sesungguhnya. Terlebih pengakuan akan kesetaraan/keabsahan *manhaj* yang dipilih kelompok

Pengerasan klaim yang berujung pada “ekstremitas klaim” kelompok tentunya merupakan parasit multikulturalisme yang harus dipangkas.

lain yang berbeda, ibarat jauh panggang dari api. Tentunya kita tidak berharap untuk mengulangi jejak kelabu peristiwa *mihnah*, karena logika yang akan berlaku adalah setiap kelompok/aliran pemikiran yang berbeda dengan “mazhab resmi” harus diluruskan sesuai dengan parameter-parameter yang telah lebih dahulu di *set up* oleh “ekstremitas klaim” mazhabnya. Kalaupun pada akhirnya mereka yang dipandang berbeda itu akan mengancam otoritas keagamaan wacana resmi, maka pengadilan sepihak tidak jarang menjadi opsi populer untuk mengamankan otoritas mazhabnya. Klaim primordialisme kelompok merupakan sesuatu yang alamiah karena memang disitulah jantung komitmen keyakinannya, namun pengerasan klaim yang berujung pada “ekstremitas klaim” kelompok tentunya merupakan parasit multikulturalisme yang harus dipangkas.

Cita-cita sosial untuk



Klaim versus Kesucian

membangun lanskap keberagaman yang mengakui kesetaraan artikulasi kesalehan sosial membutuhkan tinjauan sosiologis-antropologis yang berimbang dan empirik. Yang harus menjadi asumsi adalah bahwa setiap tingkatan tekstur keberimanan tidak hanya mengandung nilai-nilai pluralitas tapi juga memiliki keunikan lokalitas yang dinamis. Dalam komunitas yang dinilai homogen sekalipun akan ditemui unsur-unsur heterogenitas yang ikut merajut jaring kohesivitas sosialnya. Beberapa ilustrasi yang merujuk pada asumsi di atas penting untuk disampaikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan prinsip kebebasan, pengakuan, dan kesetaraan memilih serta mengekspresikan pemahaman

Dalam komunitas yang dinilai homogen sekalipun akan ditemui unsur-unsur heterogenitas yang ikut merajut jaring kohesivitas sosialnya.

maupun aliran pemikiran keagamaan.

Penelitian Diane L. Eck tentang dampak arus imigran di Amerika bagi relasi keberagaman publik melahirkan karya fenomenal *A New Religious America* (2002). Buku ini ditulis sebagai sumbangsih Eck dalam upaya membangun lanskap keberagaman baru di Amerika. Peristiwa 11 September 2001

ternyata ikut menjadi faktor kondisional yang mengancam masa depan interaksi *ethnic-religious* yang toleran serta inklusif di negeri Paman Sam tersebut. Fakta diversitas keberagaman *vis a vis* sindrom terorisme, dalam hal ini *prejudices*, yang melanda sebagian masyarakat Amerika telah mengantarkan Eck pada satu kesimpulan bahwa tantangan relasi dan interaksi antar masyarakat

beragama yang berbeda merupakan agenda yang harus mendapat prioritas teratas (2002 : xiii).

Membaca buku Eck, yang kini memimpin *Pluralism Project* di Universitas Harvard, akan terasa lengkap dari kacamata teori hukum jika kita menyimak elaborasi tentang persamaan perlakuan ekspresi keberagaman dalam *Equal Treatment of Religion in a Pluralistic Society* (1998). Buku ini memperbincangkan sekaligus menimbang dua pendekatan dalam menyikapi pluralitas keberagaman, yaitu pendekatan *equal treatment* dan pendekatan *strict separations*. Seperti diulas Carl Esbeck, pendekatan pertama lebih memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak keberagaman kelompok-kelompok agama dibanding pendekatan kedua yang memisahkan serta membatasi keterkaitan intitusi-intitusi agama dengan kewajiban maupun hak



Melihat diluar pagar adalah sebuah kata bijak dalam menyikapi pluralitas keberagaman

lembaga-lembaga publik (1998:202). Adapun pendekatan *strict separations* akan berimbang pada keterbatasan kebebasan keberagamaan.

Lanskap keberagamaan dalam sosiologi masyarakat multikultural sangat membutuhkan ruang kesadaran untuk membiarkan kelompok lain menganut dan mengekspresikan nilai-nilai keberagamaan yang berbeda. Proses perjumpaan bahkan pada akhirnya kontrak sosial yang mempertemukan berbagai unsur etnik, agama maupun kelompok keagamaan (*firqah*) akan bermuara pada pembangunan ruang publik bersama sebagai arena kontestasi gagasan sosial. Amerika yang selama ini diidentikan sebagai



bangunan sosial dalam lokalitas tertentu tidak serta merta didominasi oleh satu entitas tertentu apalagi tunggal. Artinya, selalu ada unsur diversitas, *difference*, dan variasi dalam

mengekspresikan ketaatan maupun kesalehan yang diakui setiap kelompok.

Pembacaan Eck senada dengan temuan Andrew Beatty (2001) ketika mencermati pergerakan tekstur agama di Jawa. Pada kadar tertentu, kesimpulan yang ditarik Beatty mementahkan trikotomi agama Jawa

yang didengungkan Clifford Geertz. Menurutnya, masuknya Islam ke pedesaan melahirkan dinamika-dinamika yang mengkerangkakan Islam Jawa dalam hibridasi ekspresi

kesalehan. Transisi ekspresi keberagamaan menuju bentuk Islam yang lebih "murni" begitu menonjol dalam konstelasi agama Jawa di pedesaan. Ritus keagamaan dalam perspektif diversitas agama tidak bisa dilepaskan dari konteks kebudayaan yang mengkondisikan kehadiran keragaman simbol, ekspresi kesalehan sampai variasi bentuk-bentuk formal institusi keagamaan itu sendiri. Namun mazhab maupun kelompok keagamaan pada garis *mainstream* (wacana/ mazhab resmi) biasanya menempatkan variasi pemahaman agama Jawa dalam kategori kelompok sosial keagamaan minor. Pandangan seperti ini berdampak pada ketiadaan kebebasan dan pengakuan kesetaraan kelompok-kelompok lain yang jelas berbeda dengan kelompok pemikiran yang memproklamirkan diri sebagai mazhab otoritatif.

Pada akhirnya, kita diingatkan bahwa ekstremitas klaim sebagai mazhab otoritatif sangat mudah terjerumus pada otoritarianisme mazhab. Dengan begitu, gagasan *politic of recognition* yang mengakomodasi perbedaan dan pluralitas pemahaman keagamaan akan (terus) tenggelam di bawah bayang-bayang rezim pemaknaan yang absolut. □ (Fajar Riza).

Proses perjumpaan bahkan pada akhirnya kontrak sosial yang mempertemukan berbagai unsur etnik, agama maupun kelompok keagamaan (*firqah*) akan bermuara pada pembangunan ruang publik bersama sebagai arena kontestasi gagasan sosial.

negara Kristiani, pada kenyataannya dibangun oleh perbedaan keyakinan agama yang sangat heterogen. Satu hal yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kohesivitas sebuah

KEBERAGAMAN KOMUNITAS KEAGAMAAN DI SURAKARTA

BALAI KOTA

SURAKARTA

*Membongkar
Stereotip,
Membangun
Integrasi*

Disintegrasi kehidupan antar-umat beragama sering kali lebih dipicu oleh adanya stereotip. Gelembungan prasangka itu kemudian mengembang menjadi rasa saling curiga. Buntutnya hubungan antar-umat beragama pun kurang harmonis.

Dusun Ngruki tampaknya patut diusulkan masuk Museum Rekor Indonesia (MURI). Palsalnya, jika dihitung secara statistik, nama dusun itulah yang paling sering disebut dalam pemberitaan di media massa sejak beberapa tahun terakhir ini. Bukan saja media nasional, tapi juga internasional. Dusun Ngruki menjadi terkenal, sering menjadi *headline* pemberitaan media massa, karena di dusun tersebut berdiri Pondok Pesantren Al Mukmin, yang sesepuhnya Abu Bakar Ba'asyir dituduh sebagai terlibat terorisme internasional.

Akibat pemberitaan yang demikian itu, bayangan seram pun segera menyembuk ke permukaan begitu nama Ngruki disebut. Stereotip yang muncul kemudian Ngruki seakan-akan adalah kawasan yang eksklusif, tertutup dan menjadi "sarang" teroris. Apalagi, ketika peristiwa bom marak di Tanah Air, lagi-lagi orang sering mengaitkan dengan Ngruki dan Pesantren Al Mukmin. Dan juga entah apa kebetulan, sejumlah tersangka kasus bom, bahkan di antaranya ada yang sudah divonis, ternyata alumni Pesantren Al Mukmin Ngruki.



Benarkah demikian? Tentu hanya Allah SWT yang Maha Tahu. Namun, kesan seram, tertutup, keras dan sejenisnya tersebut segera sirna begitu kita memasuki kawasan Ngruki, khususnya ketika masuk ke kawasan Pesantren Al Mukmin. Yang muncul justru kesan sebaliknya, Ngruki tidak beda dengan dusun-dusun lain di sekitarnya. Beberapa penghuni pesantren pun, ketika ditemui KS, juga bersikap ramah, terbuka, santun dan bersahaja. "Orang-orang pondok setiap hari berbaur dengan kita ini, Mas. Mereka sopan, ramah dan terbuka," aku Heru, penduduk setempat.

Toleransi Tinggi

Dengan demikian, sebenarnya, munculnya kesan tertutup, angker, eksklusif bagi komunitas Ngruki, termasuk pesantrennya, tidak lain hanyalah stereotip, pelabelan belaka. Pemberitaan media yang selalu mengait-ngaitkan antara Pesantren Al Mukmin dengan peristiwa terorisme dan Islam garis



Repro TEMPO

keras semakin memperkuat pelabelan tersebut. Ibarat pepatah Jawa, *gebyah uyah pada asine*, hanya seseorang yang barangkali terlibat, yang lainnya dianggap berperilaku sama.

"Bagi kami, penduduk setempat, keberadaan Pondok [Pesantren Al Mukmin] Ngruki terus terang sangat membantu perubahan masyarakat, khususnya di bidang agama," kata Sumarmi, ketua RT setempat. "Dulu, di RT ini belum ada masjid, sekarang sudah berdiri dua masjid. Perkembangan pendidikan keagamaan di sini otomatis juga turut meningkat dengan adanya dua masjid

tersebut."

Salah satu masjid kepunyaan pondok pesantren pun dibangun di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan masjid yang bernama Baitussalam ini berada di pojok simpang tiga persis di depan ponpes dan dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk. Pada suasana Jumatan, ketika reporter KS ikut Shalat Jumat di sana jamaahnya ternyata juga sangat terbuka dan beragam, terdiri dari santri maupun penduduk sekitar dan juga musafir.

Uniknya, biasanya sebelum azan Jumat, setiap masjid hampir selalu mengumandangkan kaset pengajian lewat pengeras suara. Tapi, Masjid Baitussalam tidak mengumandangkannya. Hal ini tidak lain untuk menghormati warga non-muslim. Kenyataan ini menandakan toleransi mayoritas umat Islam terhadap minoritas non-Islam telah terbangun di sana.

Melindungi Umat Lain

Meski dengan latar berbeda, suasana damai dan penuh kerukunan juga terpotret di

Komplek Ngruki dok. Ngruki.



Komplek Asrama dan Sekolah Madrasah Mutawasithah (MMT) / SLTP



Sebagian Asrama Putra bagian utara Madrasah Aliyah



Repro TEMPO

komunitas Gereja Keluarga Allah Widuran, Solo. Gereja menempati bekas Gedung Bioskop Star ini berdiri sejak 1983. Sebelum berada dilokasi ini gereja ini dahulunya mengambil tempat di rumah salah satu Jemaat yang lokasinya di belakang lokasi Gereja Widuran saat ini. Pihak gereja, melalui Humasnya, Sutikno, mengakui memang selalu saja ada respons apabila di negara ini terjadi konflik antar-umat agama. Namun dari pihak gereja, senantiasa menekankan bahwa

semangat untuk menyayangi dan mencintai meskipun dalam kepedihan itu penting. "Kita hanya akan mendoakan saudara kita yang di Poso di Ambon supaya mereka kuat. Kita yang tidak tahu akar permasalahan sebenarnya apa tidak perlu untuk ikut panas atau bagaimana," ungkap Sutikno.

Di Gereja Keluarga Allah penekanan untuk persatuan antar umat beragama selalu didahulukan. Pembelajaran yang baik pada umat adalah penting. Jemaah memang senang sekali dengan pengkhotbah yang menceritakan kejelekan umat lain dan kemudian umat diprovokasi untuk ikut membenci. Namun bagi pihak gereja sendiri, kata dia, jika mengalami hal itu, akan mengambil tindakan dengan tidak mengundang pendeta yang tidak mencerdaskan umat. "Bagi umat Kristen, akan sia-sia jika kita beribadah tapi tidak bisa bersosial dengan baik antar manusia siapapun dia," tandasnya.

Jemaah Gereja Keluarga Allah tidak akan merasa canggung atau bagaimana, kalau melihat umat lain ikut beribadah dalam

gereja, meskipun dia tetap mengenakan atribut keagamaannya. Karena, sebelumnya, sudah punya pengalaman dari kalangan mahasiswa atau ada beberapa umat lain yang ke sini untuk minta didoakan. Karena ia merasa tenang, kami pun bersedia melayani. Beberapa kali ia datang dan sampai saat ini pun ia masih berpegang pada agamanya.

Bahkan, pernah ada umat agama lain yang minta perlindungan di gereja, karena tidak mau diberangkatkan untuk "berperang" di daerah konflik. Dia minta didoakan dan pihak gereja pun kemudian mendoakan dia dan lalu oleh pihak gereja dia disembunyikan beberapa hari di dalam gereja. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya tanpa harus pindah agama seperti yang dianut gereja. "Dia adalah orang yang sedang terguncang bagaimana mungkin kita menolak, sama-sama makhluk Tuhan yang juga wajib kita kasih."

Suasana yang mengarah ke ajakan damai juga terjadi di Gereja Bethel Injil Sepuluh. Heri



Membangun Sikap Positif

Sikap untuk menerima perbedaan memang tampaknya sudah jadi keharusan, karena perbedaan itu sudah jadi realitas yang tidak mungkin dihindari. "Perbedaan antara manusia adalah suatu keniscayaan, begitu juga perbedaan antara komunitas, bangsa juga agama," ungkap HM Dian Nafi', aktivis gerakan antar-umat yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Mu'ayyad Cabang Windan.

Etnologi dan studi Etnografi juga menerangkan bahwa semua komunitas memiliki kekhasan budayanya sendiri. Oleh karena itu, kata mantan Ketua Tanfidziyah NU Cabang Solo ini, pergaulan antar perbedaan itu menjadi penziarahan kehidupan yang menarik karena ada proses saling belajar dan memperkaya perspektif. Karena perbedaan itulah, kerja sama antar manusia menjadi mungkin dan sedikit demi sedikit bisa membangun peradaban manusia. "Mula-mula perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, namun setelah berproses, perbedaan itu memunculkan banyak sekali manfaat, maka kita bisa menemukan perbedaan itu sebagai anugerah," katanya.

Karena itu,

memang sudah seharusnya dibangun sikap positif dalam memandang agama lain. Segala prasangka, stereotip, yang sering menjadi biang keladi konflik antar-umat beragama, sudah selayaknya dikubur dalam-dalam. Bukankah sudah terbukti, di suatu komunitas yang sering diprasangkai sebagai eksklusif, ternyata, setelah didekati, juga bisa menerima perbedaan. Setelah itu, sudah selayaknya dibangun dialog intensif antar-iman. Sehingga, integrasi sosial di tengah indahnyanya keberagaman pun terbangun. ▣

*(Mh. Zaelani Tammaka,
Wawan Kardiyanto, Rif'atul
Khoiriyah)*



Susanto, aktivis gereja tersebut, berpendapat memang penting membangun sikap inklusif dalam beragama. Sikap inklusif, menurut dia, sikap yang berdasarkan pada persamaan, sama-sama warga Indonesia, sama-sama menghirup udara yang sama, sama-sama meminum air yang sama.

"Berpijak dari sikap inklusif ini adalah titik temu dari pluralitas dan akan tertanggulangnya semua masalah. Orang yang memiliki faham fundamental dalam keagamaannya akan cenderung baik apabila ia bersikap inklusif. Mereka justru akan berpegang teguh pada keyakinan agamanya untuk menolong orang lain. Orang yang beriman dan bertakwa diharapkan juga dapat memberikan hidayahnya pada orang lain dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya."



Pasar Klewer contoh suasana integrasi sosial di tengah indahnyanya keberagaman

Doc. PSB-PS

Pluralisme: Wacana dan Praktik

Bagi individu yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenal dan mengerti pluralisme, maka sulit diharapkan untuk mengerti prinsip pluralisme.



Indahnya Kerukunan

Istilah pluralisme telah populer di berbagai kalangan, walaupun digunakan dengan pemahaman yang plural pula. Istilah pluralisme juga sering ditukar-gantikan dengan istilah multikulturalisme—di-Indonesiakan menjadi keanekaragaman, sudah tidak ada perbedaan lagi. Dari permukaan kedua istilah itu memang kelihatan sama, walau berasal dari akar kata yang berbeda: plural dan multi-kultural. Apalagi kalau keduanya diberi imbuhan “-isme”, terasa semakin sulit dibedakan. Dilihat lebih dalam maka dapat dibedakan dan memberikan perspektif yang tidak tumpang tindih. Sebagai sebuah pemikiran, saya ingin memberikan konsepsi yang berbeda, karena juga akan memberikan perspektif yang lebih tajam untuk menganalisis realitas masyarakat.

Pluralisme merupakan cara pandang dan sebuah sikap individu, sedangkan multikulturalisme cara pandang secara komunal, tepatnya kultural yang selalu merupakan konvensi bersama. Komunal bisa juga dalam arti yang lain, seperti agama, kelompok penggemar Vespa, dan sebagainya. Tidak semata-mata mengacu pada etnisitas. Pandangan individu sangat berbeda

dengan kultural, walaupun individu dapat—bahkan sebagian besar—belajar dan berkembang dalam kultur tertentu. Jadi pandangan individu bisa berbeda dengan kultur yang melahirkannya. Individu yang dilahirkan sebagai orang Minangkabau belum tentu menganut pandangan kultur Minangkabau, apalagi kalau individu tersebut dilahirkan di luar ranah Minangkabau, di Jakarta misalnya. Dengan demikian, perubahan pandangan individu dapat ditentukan oleh individu, sedangkan pandangan kultural menghadapi kompleksitas tersendiri, karena sulit dilakukan seorang individu.

Banyak pandangan komunal (suku bangsa) memberikan kategori

multikultural yang mengambang, paling tidak bisa dilihat secara bahasa. Dalam bahasa Batak Toba dan Minangkabau misalnya, perbedaan kultural dibedakan hanya dua. Batak Toba mengatakan *halak hita* ("sama dengan kita") dan Minangkabau mengatakan *urang awak*. Dalam kedua kata itu tersirat makna kita dan bukan-kita dalam membedakan antara orang Toba Minangkabau dengan yang "lainnya". Secara anekdot banyak diartikulasikan juga dalam bahasa Indonesia. "Hanya ada dua bangsa di muka bumi ini: Bangsa Indonesia dan non-Indonesia." Tentu sulit untuk menerima itu, tapi banyak suku bangsa di Indonesia yang tidak mengenal banyak suku lainnya, terutama pada suku yang relatif terisolasi. Pandangan seperti itu memberikan makna yang bisa tidak menerima multikulturalisme, di mana multikultural adalah fakta. Bersamaan dengan pembagian itu, terkandung sisi lain yang sulit bagi perkembangan multikulturalisme. Secara esensial, sebuah suku bangsa (termasuk komunitas lainnya) untuk menjaga "keutuhannya" harus mempertahankan keunikannya, sehingga menolak untuk meleburkan diri dan menjadi sama dengan lain. Kalau tidak menolak peleburan, akan terjadi homogenisasi, sekaligus menghilangkan identitas komunitas itu. Inilah tantangan berat multikulturalisme, walau untuk bersikap multikulturalisme tidak harus menghilangkan

keunikan, tetapi seolah mengancam prinsip keunikan itu sendiri.

Pluralisme adalah sebuah pilihan. Setiap individu dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar pluralisme, tetapi di sisi lain, dapat juga menolaknya. Pluralisme pada tataran ini masih sebagai pengetahuan, pengertian gampang dapat dikatakan bagian dari wacana. Sebuah publikasi, termasuk *Kalimatun Sawa'*, memberikan kontribusi pada tataran wacana. Dan pengetahuan merupakan sebuah permulaan. Bagi individu yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenal dan mengerti pluralisme, maka sulit diharapkan untuk mengerti prinsip pluralisme.



Ramapithecus disebut "penggambaran pertama dari keluarga manusia"

Begitupun saya tidak meyakini bahwa pengetahuan (wacana) akan mencapai tujuan dasar pluralisme (maupun multikulturalisme): melakukan sikap pluralis dalam kehidupan keseharian. Setiap orang dapat mengetahui dan menguasai secara mendalam prinsip pluralisme, tapi setiap orang bisa memilih untuk melakukan prinsip itu dalam kehidupannya atau tidak. Prinsip pluralisme sering kali juga tidak secara rinci dapat diterapkan secara mudah (operasional) untuk setiap konteks. Teori Darwin tentang evolusi misalnya, sudah lama sekali diadopsi oleh ilmuan sosial untuk mengamati multikultural. Sampai hari ini kita masih menemukan pandangan bahwa satu kebudayaan satu suku bangsa lebih maju atau tinggi dari kebudayaan lainnya. Bahkan pada awal abad 20 masih merajalela perkembangan teori evolusi untuk menyusun tingkat kebudayaan suatu masyarakat, mulai dari primitif, kuno, hingga beradab (maju). Hal ini sering sulit dibedakan antara kebudayaan dengan teknologi, tetapi dalam kesenian (mungkin bagi yang mengerti) lebih mudah memberikan contoh bahwa musik yang diciptakan sekarang ini tidak lebih tinggi dari musik yang diciptakan ratusan atau seribu tahun yang lalu. Contoh lain, sulit untuk meyakinkan pandangan di Indonesia sekarang ini, bahwa masyarakat yang tidak menggunakan pakaian

Capaian terberat dari pluralisme harus menggapai multikulturalisme. Kedua hal ini dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi yang harus disadari adalah letak dasar penghalang antara kedua sikap non-pluralisme individu dan non-multikulturalisme komunal. Pada titik inilah pentingnya membedakan konsep pluralisme dan multikulturalisme

lembaga pendidikan tinggi dan kaum akademisi. Begitupun, aspek ini tidak kurang pemikiran dan keterlibatan setiap orang untuk mengembangkannya. Kedua, gagasan rinci dan kasuistis. Aspek yang masih jarang digarap, walaupun sering digunakan secara parsial sebagai penjabar gagasan besar (teoritis). Melalui kajian yang lebih khusus dan kasuistik akan menguji berbagai teori dalam kehidupan

memberikan gagasan untuk mengembangkan program yang mempraktekkan sikap pluralisme dalam kehidupan: sebagai tujuan akhir proyek pluralisme dan multikulturalisme.

Secara lebih nyata, terbitan juga bisa melakukan perpanjangan tangan untuk melakukan program dalam aktivitas praktis, sebagai usaha untuk mengembangkan program konkret. Dalam istilah stasiun radio, kegiatan konkret praktis disebut dengan *off air*. Stasiun radio tidak hanya mengunjungi pendengarnya melalui gelombang frekuensi, tapi mengundang pendengarnya untuk bertemu dan melakukan kegiatan bersama. Model ini bisa dianalogikan dalam kegiatan sebuah terbitan, untuk mengembangkan gagasan sebuah program dan melaksanakan

mempunyai posisi yang lebih rendah dari yang berpakaian. Sehingga pernah ada kebijakan di Indonesia untuk memberikan pakaian kepada masyarakat yang tidak berbudaya pakaian, dan memberikan rumah pada masyarakat yang hidup di laut atau di hutan. Kompleksitas seperti itu bukanlah hal mudah untuk dipahami dalam pandangan pluralisme dan multikulturalisme.

Tantangan terberat ke depan yang dihadapi oleh terbitan seperti *Kalimatun Sawa'* adalah mengerahkan perkembangan gagasan pluralisme (multikulturalisme) dalam tiga aspek. Pertama, gagasan besar dan teoritis. Aspek teoritis ditekuni oleh banyak lembaga dan individu, karena pluralisme dan multikulturalisme itu mulai mengalami perkembangan di

nyata, apakah pluralisme mengarah kepada (relativisme) absolut atau titik abu-abu antara yang diterima atau ditolak oleh

pandangan pluralisme. Ketiga, kehidupan praktis. Pandangan pluralisme harus dijadikan sikap dalam

bertindak. Kajian mengenai bagaimana mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan konkret (dan menuju massal) yang dapat memberikan ruang gerak untuk melakukan program pluralisme. Secara natur, sebuah terbitan akan sulit untuk mencapai tahap ini, tetapi secara konseptual dapat



sebagian dari program itu.

Bagian terakhir adalah capaian terberat dari pluralisme harus menggapai multikulturalisme. Menurut pendapat saya, kedua hal ini

dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi yang harus disadari adalah letak dasar penghalang antara kedua sikap non-pluralisme individu dan non-multikulturalisme komunal. Pada titik inilah pentingnya membedakan konsep pluralisme dan multikulturalisme. □

TANTANGAN HUMANITAS BARU DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pernyataan Presiden Megawati Sukarnoputri bahwa Pendidikan Agama telah melahirkan pemeluk-pemeluk agama yang fanatik, menarik bila dikaitkan dengan isu multikulturalisme yang terus merambah berbagai wacana kehidupan. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme berarti representasi yang lebih baik atas semua kelompok masyarakat dalam sektor privat dan publik, serta peluang yang sama dalam praktik kehidupan. Toleransi atas kelompok-kelompok bahasa, agama, suku, etnik dan kultural adalah upaya pencarian suatu kebudayaan pelangi. Namun sebagian dari kita masih curiga. Mereka khawatir bahwa multikulturalisme akan menghancurkan gagasan tentang bangsa Indonesia, bahkan bangsa manapun. Multikulturalisme, khususnya dalam dunia pendidikan, dipandang sebagai keburukan.

Pandangan itu hanya benar dalam konteks negara-bangsa, atau bahkan dalam representasi kolektif apapun yang sifatnya eksklusif. Bagi mereka yang setia untuk menciptakan dan berpartisipasi dalam pendidikan yang membuka suara-suara otentik yang lain, pendidikan multikultural melampaui teks nasionalisme dan menciptakan tipe baru globalisme. Inilah pengakuan atas perbedaan dalam kesatuan universal.

Bagi kita, multikulturalisme meyakini bahwa perbedaan harus menjadi bagian dari kurikulum. Pandangan-pandangan kelompok keagamaan dan kebudayaan tidak boleh dilihat sebagai ancaman bagi ideologi negara namun sebagai bagian dari kekayaan nasional. Perbedaan dapat memperkuat kedirian poskolonial, bukan menghancurkannya.

Kesatuan universal bukanlah dalih sederhana bagi pluralisme. Pluralisme di dunia demokrasi berkenaan dengan banyak suara yang perlu diperhatikan. Ide terbaik akan memenangkan kompetisi. Peran guru adalah menyajikan perbedaan perspektif secara terbuka. Bagaimanapun, pluralisme di sini masih dikontektualisasi oleh liberalisme. Jadi pluralisme bersifat dangkal. Pluralisme terdalam akan bertanya: bagaimana perbedaan budaya



mengartikulasikan hak-hak orang lain dan apa inti dari kesatuan dalam perbedaan ini?

Misalnya, bila dalam pluralisme liberal semua nilai terbuka bagi pilihan individu, dalam kebudayaan Islam terdapat fundamental tertentu yang membatasi apa yang mungkin. Dalam kebudayaan Tantra, sebelum pendidikan mulai ada saat-saat untuk meditasi. Ini semua membuka jiwa intelektual terhadap intuisi diri yang bermanfaat untuk dapat lebih memahami suatu topik tertentu.

Pendidikan multikultural menciptakan struktur dan proses yang memperbolehkan ekspresi berbagai kebudayaan, komunitas dan individual. Untuk memulai tugas ini, kita kali pertama harus

menegakkan netralitas nilai dalam institusi-institusi pendidikan, seperti perpustakaan. Pastikan bahwa muatan teks tidak etnosentrik. Ruang-ruang dan rak-rak buku harus didekonstruksi. Sistem informasi tidak didominasi oleh kebudayaan tertentu. Perpustakaan multikultural menyerupai *world wide web* bahkan menerima alternatif bagi cara-cara lain mengetahui dan menjadi. Homogenitas perpustakaan sebagai sistem informasi terorganisir harus direkonstruksi jika kita ingin mulai mengembangkan kerangka konseptual pendidikan multikultural. Untuk melakukannya kita perlu lebih jauh memaknai perbedaan.

Perbedaan bukan hanya

mewakili struktur dalam, yakni bagaimana kebudayaan-kebudayaan memandang diri, orang lain, dan alam. Bahkan juga bagaimana kita membahasakan dunia. Bahasa tidaklah netral tapi membawa nilai-nilai kultural, yang secara aktif menyusun realitas. Bahasa adalah suatu praktik interaksi dalam mencipta dunia baru. Misal, banyak dari kita sekarang berbahasa Indonesia, lebih dari itu sesungguhnya sedang “meng-indonesiakan” dunia menurut cara kita mengetahui dan belajar.

Jadi, pendidikan multikultural bukan semata tentang belajar dan mengajar lebih dari satu bahasa, bahkan juga melihat bagaimana bahasa-bahasa mengkonstruksi pandangan dunia. Untuk

menghindari jatuh dalam relativisme kultural, pendidikan kritis juga perlu menelisik biaya sosial dan kultural berkaitan dengan bahasa dan peradaban apapun.

Perbedaan ini penting tidak hanya pada tingkat kultural namun juga pada tingkat nasional dan individu. Cara kita menyusun pengetahuan tidak netral tapi berdasarkan struktur berbagai kebudayaan pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah memahami berbagai mazhab pemikiran.

Cara individu mencari informasi dan kebenaran dalam kebudayaan-kebudayaan juga berbeda. Sebagian mencari pada perguruan tinggi terbaik, sebagian lain pada guru terbaik, dan lainnya pada pemikir terbaik. Kita tahu bahwa sebagian orang belajar dari pengalaman, sebagian dari kuliah teori, dan lainnya dari media visual. Sebagian memilih kuliah profesor, sebagian memilih kelompok kecil, dan lainnya memilih interaksi orang perorang. Sebagian belajar secara intuitif, sebagian secara inderawi, dan lainnya rasional. Sebagian fokus pada pemikiran, sebagian pada praksis, dan lainnya pada teknik.

Perbedaan cara mengajar dan belajar bersifat struktural.

Pendidikan holistik perlu mempertimbangkan keragaman ini. Maka, mengajar multikulturalisme lebih dari sekedar memastikan fakultas pendidikan dari berbagai latar belakang. Peradaban, bahasa, gaya etnik, cara mengetahui, dan gender perlu diakomodasi. Perbedaan pendidikan mengundang pluralisme mendalam sesuai

Pendidikan multikultural menciptakan struktur dan proses yang memperbolehkan ekspresi berbagai kebudayaan, komunitas dan individual.

dengan cara kita mengetahui dan belajar. Apakah kita siap untuk ini? Kebanyakan dari kita belum siap. Mengajar lintas budaya dan cara mengetahui melibatkan interaksi konstan dengan diri (gaya mengajar) dan dengan siswa (apa yang terjadi dalam pandangan dunia mereka).

Namun mengajarkan perbedaan saja belum cukup. Bagi Shrii P.R. Sarkar, mengajar dan belajar harus berdasarkan humanisme baru. Kita harus belajar tentang perjuangan manusia berhadapan dengan sejarah dan bagaimana mereka mengatasi tantangan hidup. Bahkan kita tidak hanya merefleksikan sejarah kita sendiri namun juga interaksi dengan alam dan Tuhan. Pengetahuan kita tentang alam bukan sebagai yang lain, tapi sebagai makhluk yang hidup dan bernafas. Ketuhanan dikonstruksi bukan sebagai entitas yang dapat dimiliki, namun

sebagai inspirasi yang membawa pada cinta yang lebih besar dan pemahaman yang lebih baik tentang orang lain. Ketuhanan mendorong sejarah menciptakan kemajuan yang terbebas dari perangkap kulturisme, genderisme dan nasionalisme sempit atau bentuk-bentuk identitas eksklusif lainnya.

Ada sejumlah landasan yang harus diajarkan tanpa memandang perbedaan. Meskipun teknologi baru mengajarkan cara kita berpikir dan belajar, namun ia tidak menghentikan proses yang lebih penting untuk menjadi manusia. Teknologi tidak dapat menghentikan proses mengetahui. Sebagaimana relativitas posmodernisme yang tidak mendasarkan pada rasionalitas kemajuan, Sarkar dan pakar lain mengajak kita untuk lebih terbuka pada berbagai tingkat rasionalitas baru. Yang benar, yang baik, dan yang indah dalam pendidikan multikultural tidak dibendung. Jalan menuju ketiganya, makna yang diberikan padanya, kerangka pengetahuan dan pembelajaran yang kita peroleh darinya, justru diperluas. Inilah budaya kebijaksanaan yang coba dicari dan ditemukan dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang mendalam menggagas masa depan di mana keragaman bersatu dalam humanitas baru. □

** Mahasiswa S3 UIN Yogya dan peneliti Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.*

MULTIKULTURALISME SEBAGAI ANUGERAH Memperkaya Spiritualitas dan Iman

Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multi dimensional, maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks, dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari apalagi dimusnahkan.

Persoalan muncul ketika dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat yang kompleks memunculkan konflik, yang dengan sendirinya akan mengguncang tatanan multikulturalisme. Apalagi jika konflik itu melebar menjadi perebutan hegemoni kekuasaan politik, ekonomi, wilayah dan harga diri yang berbasis pada suku, ras, agama dan ideologi politik, sehingga multikulturalisme akan dilihat sebagai kearifan yang sia-sia, yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan keberpihakan, sikap yang tidak realistis dan lemahnya solidaritas.

Multikulturalisme sesungguhnya tidaklah datang tiba-tiba, karena sebagai suatu kearifan, ia sesungguhnya merupakan buah dari perjalanan intelektual yang panjang, bergulat dan terlibat dalam berbagai gejolak dan konflik. Karena itu,



Indahnya aneka aksesoris boneka yang warna-warni

multikulturalisme bukan barang dagangan untuk diperjual-belikan kepada berbagai *funding* seperti yang dituduhkan oleh berbagai pihak yang mencurigainya. Multikulturalisme adalah posisi intelektual yang menyatakan keberpihakannya pada pemaknaan terhadap persamaan, keadilan dan kebersamaan, untuk memperkecil ruang konflik yang destruktif.

Kecurigaan terhadap multikulturalisme di tengah maraknya konflik, ketidak-adilan dan tajamnya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan keagamaan memang bisa dimengerti. Karena dalam setiap konflik sosial, apalagi yang berkembang menjadi kekerasan yang terbuka, akan muncul sikap-sikap yang hitam putih, kita dan mereka atau *minna wa minhum*. Pada tahap ini, multikulturalisme

akan dipandang oleh mereka yang terlibat dalam konflik sebagai sikap oportunistik, egoistik, tidak ada kepedulian dan pertanda dari "lemahnya iman".

Karena itu, multikulturalisme sesungguhnya memerlukan ruang dinamis untuk menguji kesahihan pemikirannya sendiri dengan mengajak dan membuka dialog dengan berbagai pihak dan kalangan lintas agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, sebagai manifestasi dari filosofi multikulturalisme itu sendiri yang selalu berusaha menjauh dari jebakan penyempitan wawasan paradigmatiknya. Melalui proses dialog itu, multikulturalisme akan memperkuat dirinya sendiri dan secara dialektik akan membentuk pemikiran sintetik baru yang lebih sah. Aktualisasi multikulturalisme akan menjadi proses pemikiran intelektual yang terus mengalir

tanpa batas, karena membatasinya berlawanan dengan jiwa dan makna multikulturalisme sendiri.

Tuntutan untuk mengambil sikap yang berpihak dalam konflik sosial yang multi dimensional semakin mengeras, ketika simbol-simbol "agama" mulai terseret dalam konflik itu, sehingga mereka yang tidak berpihak akan disudutkan sebagai wujud dari lemahnya keimanan seseorang, karena termakan oleh godaan kepentingan duniawi yang telah menguasai kehidupannya. Keberpihakan adalah panggilan agama, dan siapa yang ikhlas memenuhi panggilannya akan mendapatkan imbalan sorga, karena pengorbanan mereka, apalagi kalau sampai menemukan ajalnya, maka mereka mati sebagai *syahid*.

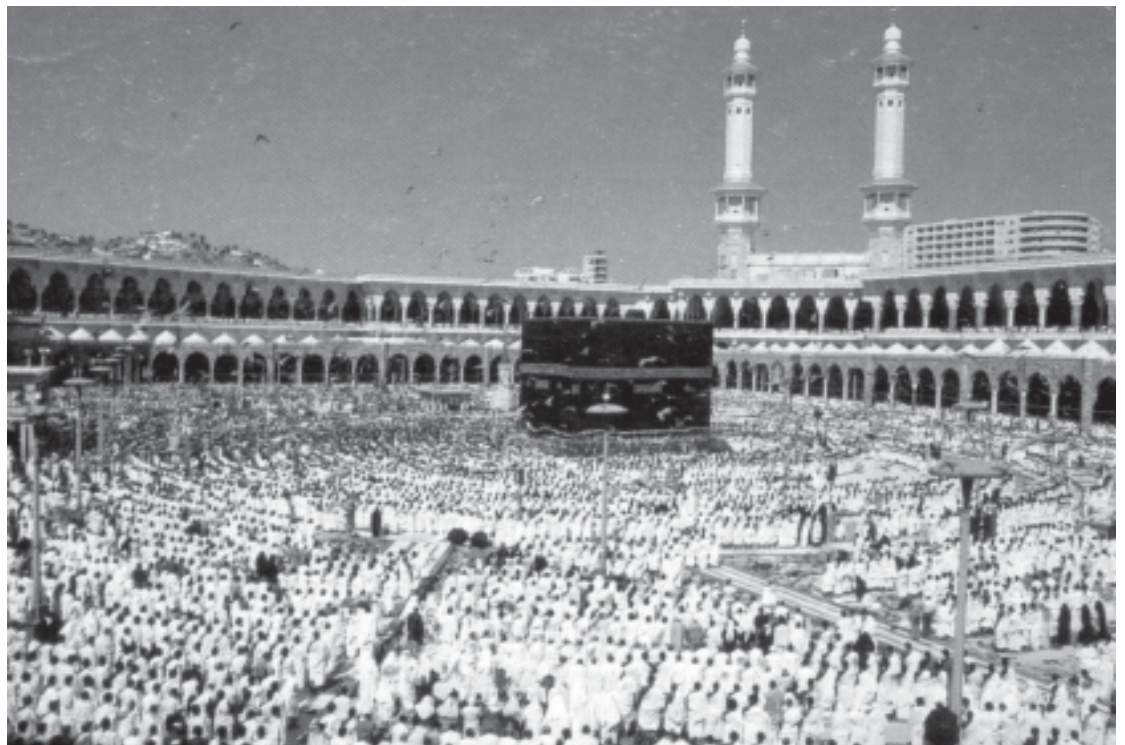
Karena itu, multikulturalisme

harus diletakkan pada posisinya yang tepat, apalagi menghadapi konflik yang berbasis pada ras, suku dan keagamaan.

Multikulturalisme seharusnya ditempatkan pada posisi yang bukan untuk keberpihakan negatif yang akan memperparah konflik makin meluas dan tak terkendali, tetapi pada keberpihakan positif untuk mencari solusi. Solusi tidak akan mungkin, jika pandangan multikulturalisme tidak dijiwai dengan baik, karena justru akan mengakibatkan dirinya jatuh tergelincir pada keberpihakan yang negatif.

Multikulturalisme harus dibangun dengan berbasis pada pandangan filsafat yang memandang konflik sebagai fenomena permanen yang lahir bersama-sama dengan keanekaragaman dan perubahan yang dengan sendirinya selalu

Mekah dengan ibadah Hajinya merupakan salah satu contoh dari simbol budaya Islam bernuansa multikultural yang membawa anugerah Illahi



terbawa oleh kehidupan itu sendiri, di mana pun, kapan pun dan siapa pun. Multikulturalisme memandang bahwa adanya keanekaragaman, perubahan dan konflik sebagai sesuatu yang positif untuk memperkaya spiritualitas dan memperkuat iman. Dengan demikian, multikulturalisme seperti burung yang terbang mengangkasa dan melangit keluar dari batas-batas keberpihakan yang destruktif, melintasi batas-batas konflik untuk kemudian menukik kembali dan membumi untuk memberikan solusi alternatif yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Pada tahapan ini, multikulturalisme sesungguhnya menjadi anugerah dan rahmat bagi kehidupan semesta, karena memungkinkan harmoni kehidupan semesta itu tetap terjaga, lestari dan berkesinambungan dengan semangat berlomba-lomba dalam kebajikan dan untuk kebajikan dengan menumbuhkan persaingan yang sehat dan kreatif atau *fastabiqul-khairat*. Al-Quran 5:48 menegaskan, yang artinya “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan (*syir’ah*) dan jalan yang terang (*minhaj*). Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu atas pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa



yang telah kamu perselisihkan”.

Multikulturalisme adalah ibarat perjalanan mendaki puncak gunung untuk mendapatkan cakrawala pandangan yang amat luas sehingga tidak terperjara dalam pandangan yang sempit. Bisa juga dikatakan sebagai perjalanan iman untuk menyatu dengan kesemestaan Ilahi dan melihat anugerah Nya yang amat luas dan beraneka ragam yang kompleks dalam kehidupan yang dinamis, dan kemudian membuahakan suatu kesalehan sosial yang aktual membangun harmoni kehidupan bersama dan bersama-sama menghentikan kekerasan, penindasan dan fanatisme sempit.

Pada tahapan ini, multikulturalisme sesungguhnya merupakan proses pengkayaan spiritual dan menjadi penjelmaan iman yang cerdas. Iman bukan kata benda, tetapi iman sebagai kata kerja; kreativitas dan moralitas. Iman pada hakikatnya

merupakan proses penghayatan dan penjiwaan yang cerdas atas keanekaragaman yang terenggam dalam *sunnatullah* yang perkasa, sebagai penampakan kebesaran Ilahi, sehingga iman tidak berada dalam ruang yang seragam, statis dan kosong, tetapi berada dalam keterlibatan yang kreatif dalam dinamika keanekaragaman, perubahan dan konflik, untuk menerangi jalan menuju ke masa depan kehidupan bersama yang lebih damai, sejahtera dan berkeadilan.

Karena itu, multikulturalisme bukanlah sekedar wacana tetapi realitas dinamik, bukan kata-kata, tetapi tindakan, bukan simbol kegenitan intelektual, tetapi keberpihakan yang cerdas untuk mencari solusi yang mencerahkan. □

**Guru Besar Filsafat Islam
dan Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga*

Wawan Kardiyo*

Konsep Wahdat al-Adyan ANTARA MONO DAN MULTI sebuah renungan



... Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah 62)

Pandangan beberapa ulama Islam populer yang kontroversial, seperti al-Hallaj, Rumi, dan Ibn Arabi tentang konsep *wahdat al-adyan*, bahwa pada dasarnya sumber agama adalah satu, Tuhan yang sama, yang juga menghadirkan polemik kontroversi antara monoteisme dan politeisme, cukup menarik untuk disimak dan direnungkan.

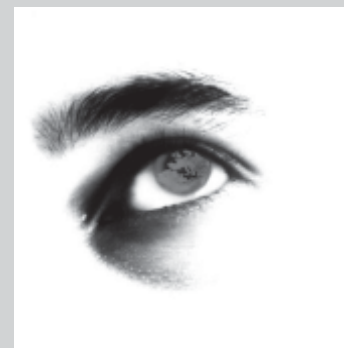
Al-Hallaj pernah mengatakan: *"Kufur dan iman hanya berbeda dari segi nama, bukan dari segi hakikat, karena keduanya tidak ada perbedaan."* Oleh karena itu, al-Hallaj menyalahkan orang yang menyalahkan agama orang lain (Abd al-Hakim Hasan. 1954: 375). Barang siapa mencaci maki orang dengan mengatakan agamanya batal, maka berarti ia telah menghukumi agamanya sendiri. Lebih ekstrem lagi, ia mengatakan: *"Ketahuilah bahwa Yahudi, Nasrani, Islam dan sebagainya adalah julukan yang berbeda-beda"*. Hal ini tersirat dalam syairnya:

"Aku memikirkan agama-agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa ia mempunyai banyak sekali

cabang. Maka jangan sekali-kali mengajak seseorang terhadap suatu agama, karena sesungguhnya akan menghalangi untuk sampai pada tujuan yang kokoh. Tetapi ajaklah mereka melihat asal/sumber segala kemuliaan dan makna, maka dia akan memahaminya" (Abd. al-Hafidz bin Muhammad Madani Hasyim, t.th. : 39).

Demikianlah, konsep wahdat al-adyan yang memandang bahwa sumber agama adalah satu, yakni Tuhan yang sama, melihat bahwa wujud agama hanyalah bungkus lahirnya saja.

Selanjutnya al-Hallaj juga berpendapat: *"If the well-Guided was pleased with indirect information how searches the route not suffice himself with an indirect race. From the Burning Bush*



*on the side of Sinai
What he heard
speak from the
Bush was not the
Bush nor its seed,
but Allah. And my
role is like this
Bush.”* (al-Hallaj,
1974 : 28).



Pandangan ini merupakan konsekuensi dari kesadaran diri atas “kehadiran” Tuhan di setiap tempat, dalam semua agama. Karena pada dasarnya agama yang dipeluk oleh seseorang secara tidak langsung merupakan “bukan hasil pilihan sendiri” (Abu al-Wafa al-Ghanami al-Taftazani, 1983 : 132). Senada dengan itu John Hick berpendapat bahwa 99% keyakinan agama tergantung pada tempat di mana seseorang dilahirkan. Seseorang yang lahir di Thailand sangat mungkin beragama Budha, yang lahir di Saudi Arabia sangat mungkin beragama Islam dan sebagainya (John Hick t.th. : 1-2)

Menurut Louis Massignon, faham *wahdat al-adyan*-nya al-Hallaj ini dilandaskan pada pandangan tauhidnya. Banyak orang sulit memahami pemikiran ini, karena nampaknya ada sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana mungkin dapat terjadi, tauhid menghendaki konsep keesaan Tuhan secara mutlak, sementara *wahdat al-adyan* mempersilahkan kehadiran konsep ketuhanan yang

bagaimanapun bentuknya (Louis Massignon, t.th. : 316). Bagi al-Hallaj, Tuhan itu satu, unik, sendiri, dan terbukti satu. Dalam sya’irnya al-Hallaj menulis:
*“He is
Allah the living.
Allah is One.*

Unique, Alone and testified as One. Both the One and the progression of Unity of the One are in Him and from Him. From Him comes the distance that separates others From His Unity. The knowledge if Tawhid is an autonomous abstract cognizance.” (al-Hallaj, 1974 : 52-53).

Baginya, Tuhan tidak bisa disifati apapun. Pensifatan padanya hanya akan membatasi-Nya (Louis Massignon, t.th. : 319). Maka konsep Tuhan yang satu harus pula dipahami secara unik, karena Tuhan adalah kesatuan yang mutlak dari keseluruhannya. Menurut al-Hallaj, penyembahan melalui konsep monoteisme ataupun politeisme, tak masalah bagi Tuhan. Pada dasarnya keduanya hanya berkaitan dengan logika, yakni antara yang satu dan yang banyak. Dari situ juga ditelusuri akan dijumpai kepercayaan-kepercayaan yang apabila ditafsirkan akan mengarah kepada satu Tuhan (Kautsar Azhar Noer,

t.th. : 321).

Konsep wahdat al-adyan ini juga dikembangkan oleh Ibn Arabi dengan agama universalnya, yaitu suatu agama yang mistikal dan bukan sekedar teistikal, suatu paham bahwa Tuhan tidak dapat disifati dan dibatasi oleh suatu apapun. Ibnu Arabi mengatakan:

“Sungguh hatiku telah menerima berbagai bentuk. Tempat penggembalaan bagi kijang dan biara bagi pendeta, rumah bagi berhala dan ka’bah bagi yang thawaf, sabak bagi taurat dan cinta... cinta itulah agama dan imanku.” (Ibnu Arabi, 1980: 77-78).

Pemikiran Ibn Arabi



Kekerasan dan teror mengotori hakekat kesucian agama

mengenai wahdat al-adyan ini dapat kita lacak dari pemahaman logikanya mengenai makna yang satu (*al-wahid*) dan yang banyak (*al-katsir*). Di sini Ibn Arabi memulainya dengan konsep *wahdat al-wujud*, dasar filosofis dalam memahami Tuhan dalam hubungan-Nya dengan alam. Tuhan tidak bisa dipahami kecuali dengan memadukan dua sifat yang berlawanan padanya. Bahwa wujud hakiki hanyalah satu, yakni Tuhan, *Al-Hallaq*. Meski wujud-Nya hanya satu, Tuhan menampakkan dirinya [*tajjala*] dalam banyak bentuk yang tidak terbatas pada alam. (Kautsar Azhari Noer, 1995: 74)

Lebih lanjut ia berpendapat, hubungan ontologis antara yang satu dan yang banyak menggunakan penjelasan matematis. Bilangan-bilangan berasal dari yang satu (dari pengulangannya) menurut pengelompokan yang telah diketahui. Yang satu mewujudkan satu bilangan. Sedang bilangan menyebarkan yang satu. Hukum bilangan hanya ada karena adanya yang dibilang, dihitung. Setiap unit bilangan adalah realitas seperti sembilan dan sepuluh sampai kepada yang terkecil dan yang tertinggi hingga tanpa batas. Tak satupun dari unit itu yang merupakan kumpulan (dari satu-satu) semata, namun pada pihak lain, masing-masing unit merupakan kumpulan satu-satu (Ibnu Arabi, 1980 : 77-78)

Rumi dengan ekstrem menyatakan:

"Aku seorang Muslim, tetapi aku juga seorang Nasrani, Brahmanisme, dan Zaratustraisme. Aku pasrah kepada-Mu wahai al-Haqq yang

Mulia ... aku hanya mempunyai satu tempat ibadah masjid atau gereja atau rumah berhala. Tujuanku hanya pada Dzat Yang Mulia. (Ahmad Amin, 1993 : xi-xix).

Sisa hidupnya sebagaimana digambarkan oleh anaknya (Sultan Walad) ditandai oleh keintiman mistik untuk mencapai tingkat "manusia sempurna", yaitu seorang dari orang-orang yang mencerminkan sifat-sifat Illahi (Ahmad Amin, 1993 : xi - xix).

Filsafat Rumi diilhami oleh gagasan monistik. Dia mengatakan "*Matsnawi*" adalah kedai kesatuan (*wahdah*): setiap sesuatu yang engkau lihat dari sana selain yang Esa adalah berhala. Mengenai medan pertempuran dalam kehidupan, ia pahami bahwa seluruh pertentangan dan perselisihan itu hanya berperan melaksanakan tugasnya dalam menjaga fungsi keharmonisan alam semesta yang hanya disadari oleh para sufi (Ahmad Amin, 1993 : xi-xix).

Beberapa pernyataan al-Hallaj, Ibn-Arabi dan Rumi di atas memang mengandung pengertian yang saling bertolak belakang. Namun kebertolak-belakangannya bukan tidak mungkin mengandung pengertian hakekat kebenaran. Puncak-puncak pikiran orang-orang unik yang didapat dari hasil pengembaraan pengalaman keagamaannya patut menjadi sebuah harapan hakiki. Paling tidak, dalam merenungi kenyataan diciptakannya perbedaan di muka bumi ini oleh



uma-agama.



Allah, dapat kita dapati hakekat tujuan dan maknanya.

Perbedaan multikultural adalah rahmat Allah. Di mana dalam perbedaan itu kita diwajibkan saling mengenal, bukan saling menghujat dan menyalahkan. Apalagi untuk bermusuhan dan saling membunuh. Setelah kita saling kenal maka kita akan bisa saling mengetahui, memahami dan mengasihi satu sama lainnya tanpa syarat. Hanya keimanan yang terwujud dalam kepatuhan dan kepasrahan serta amalan kita saja yang nanti akan dinilai oleh Allah. Dan Kalimatun Sawa' yang mengandung kembalinya segala perbedaan itu ke asalnya yang Hakiki adalah wujud puncak dari kepatuhan atas segala perbedaan yang diharapkan.

Persepsi kebenaran manusia adalah nisbi. Kebenaran adalah hanya Haq Allah. Dan penulis mengakhiri kolom ini dengan pernyataan;

"Kepada orang-orang yang saleh, baik itu beragama Kristen, Katholik, Islam, Hindu, Budha, Khonghucu, Sintho, Yahudi, Kejawen, aliran dinamisme maupun animisme, dll di segenap penjuru bumi dan di dalam ruang waktu kapan pun, semoga mereka mendapat curahan kebahagiaan dan keselamatan Tuhan di hari akhir kelak. Sebab, mereka semua secara tulus telah berusaha beribadah dan menggapai wajah Tuhan dengan mengharap kasih, cinta, dan ridho-Nya. Apakah orang-orang yang begitu tulus dan saleh tersebut tidak terselamatkan, gara-gara klaim setiap agama

yang mengaku bahwa golongan mereka sendirilah yang terselamatkan? Apakah Allah yang katanya Maha Adil dan Maha Kasih akan bertindak demikian, menghukum orang-orang yang sedemikian tulus mengharapkan Kasih dan sayang-Nya?"

Sepertinya tidak! QS. Al-Baqarah 62 menyatakan Sbb:

...Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. □

** Penulis Pegiat PSB -PS UMS*

GALERI BUDAYA



Doc.PSB-PS

FARID MA'RUF

Perlu Komitmen Menjadi Seorang Muslim

Setiap kali muncul berita bernada minor tentang seseorang yang di mata penguasa dianggap “ekstrem” dan “radikal”, tuduhan selalu diarahkan ke Pondok Pesantren Islam (PPI) al-Mukmin di Dusun Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.



Foto Ali dok. PSB-PS

“**Tuduhan** dan kecurigaan tentang adanya jaringan terorisme yang berasal dari pemerintah maupun dari pemberitaan media dalam dan luar negeri secara psikologis memang berdampak pada sebagian santri, karena darah muda dan emosi mereka belum stabil”, begitu pernyataan Farid Makruf, mantan Direktur Pondok Pesantren Ngruki saat ditanya kabar Pondok akhir-akhir ini oleh reporter KS., *Rif'atul Khoiriyah*. Ustadz yang pernah memimpin pondok selama kurang lebih 18 tahun ini menceritakan bahwa kejadian-kejadian di pondok saat ini tidaklah begitu berat seperti yang dialami ketika tahun 1985. Karena saat itu tidak ada satu ormas Islampun yang membela institusi itu secara terang-terangan. “Kami berjuang sendiri saat itu namun segala sesuatu yang terjadi ada hikmahnya malah ada keuntungannya..

Kejadian ini menjadi promosi gratis bagi pondok kami lewat pemberitaan di berbagai media. Dulu kami sempat merasa takut kalau nanti tidak ada yang mau mondok di sini, tetapi jumlah santri semakin bertambah dari tahun ke tahun, Dari sekitar 700 siswa sekarang menjadi 2000 santri yang mondok disini,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Di bawah kepemimpinannya sejak tahun 1985 sebagai pengganti Abu Bakar Ba'asyir yang saat itu pergi ke Malaysia, Pondok Ngruki telah menunjukkan komitmen dalam kelslaman yang gigih dan kuat menghadapi teror dan ancaman dari berbagai pihak yang menghendaki dibubarkannya institusi pendidikan tersebut.

Ustadz Farid Ma'ruf panggilan akrab beliau. Ditemui di kantornya, ustadz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan al-Mukmin Ngruki ini menuturkan bahwa kecurigaan pemerintah terhadap pondok adalah tidak beralasan. Seperti kecurigaan tentang Pondok melatih kadernya untuk menjadi

milisi, padahal saat itu para santri sedang berlatih beladiri pencak silat. “Bagaimanapun pondok tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut ilmu bela diri dari sejak zaman berdirinya pesantren sampai sekarang. Tujuan dari latihan bela diri tersebut bahwa nantinya tugas seorang ustadz adalah mendakwahkan agama ke berbagai tempat, maka ia perlu membekali dirinya dengan ilmu beladiri supaya ia lebih yakin dan lebih berani dalam menghadapi bahaya. Kalau dia tidak berani atau beryali kecil bagaimana ia akan mensyiarkan agama?”, ujarnya pada Kalimatun Sawa’.

Pria berusia 63 tahun ini lahir di Alabio, Kutai, Kalimantan Selatan. Sejak kecil ia sudah hidup di lingkungan Islam yang kental. Pondok Gontor adalah pilihannya ketika ia memutuskan untuk sekolah di Jawa. Tamatan Fakultas Syariah di Universitas HOS Cokroaminoto Solo ini, mengambil doktoral di IAIN Walisongo Yogyakarta. Pengalaman mengajar bagi pria kelahiran 2 Maret 1941 ini sudah didapat ketika sedang menamatkan pendidikannya di Yogyakarta. Ustadz Farid saat itu telah menjadi asisten dari Pembantu Rektor II di Universitas Cokroaminoto di Solo untuk mengajar di Fakultas Syariah.

Bagi beliau, pemahaman Islam dengan dasar al-Qur’an dan Hadis sangat penting untuk diajarkan sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah kaprah tentang Islam. Terutama untuk santri pondok yang berasal dari

berbagai daerah di Indonesia dengan bermacam budaya dan adat Istiadat sangat rentan dengan friksi-friksi paham plural. “Ditanamkan disini sebagai orang Muslim, kita terikat pada aturan-aturan Islam. Dengan patokan aturan Islam maka ukhuwah dapat tercipta dengan kuat. Aturan Islam menjadi sebuah pengikat untuk kesatuan dari berbagai kultur atau budaya masing-masing daerah. Multikultural dan pluralisme yang ada khususnya di Indonesia harus bisa kita terima asalkan tidak keluar dari aturan al-Qur’an dan

Multikultural dan pluralisme yang ada khususnya di Indonesia harus bisa kita terima asalkan tidak keluar dari aturan al-Qur’an dan sunnah. Mau kultur yang bagaimanapun kalau bertentangan dengan Islam harus kita tolak. Di Wilayah yang lebih global kita harus memilah mana yang sesuai dengan syar’i mana yang tidak. Yang sesuai bisa kita terima dan yang tidak mesti kita tolak.

sunnah. Mau kultur yang bagaimanapun kalau bertentangan dengan Islam harus kita tolak. Di Wilayah yang lebih global kita harus memilah mana yang sesuai dengan syar’i mana yang tidak. Yang sesuai bisa kita terima dan yang tidak mesti kita

tolak”.

Menurut pria yang masih tampak tegap walau hampir seluruh rambutnya memutih ini, sejak kecil orang tua sudah menanamkan prinsip keagamaan yang sangat kental. Kehidupan di Surau dan pendidikan dasar di Sekolah Muhammadiyah menjadikan dia memilih untuk lebih mengabdikan di jalur pendidikan agama daripada masuk angkatan bersenjata, meskipun kesempatan untuk menjadi tentara sudah ada. “Setelah saya tidak jadi berangkat itu, saya menerima panggilan, namun seperti yang dirasakan

waktu latihan dulu, saya merasa jiwa saya tidak cocok untuk itu”, tambahnya. Ustadz yang mengaku terpengaruh pemikir besar seperti Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya menuturkan bahwa pluralisme paham sendiri yang selama ini terjadi dalam pondok akan

diterima apabila mempunyai sandaran atau dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti seni musik atau yang lain, ada siswa yang menerima ada yang tidak kita menghargai itu. Ditambahkan olehnya, “Namun apabila konteks dari seni itu



Kegiatan rutin santriwan-santriwati pondok Al Mukmin Ngruki.

akhirnya banyak menimbulkan madharat maka akan kita hilangkan karena tidak sesuai. Contoh yang lain misalnya gerakan sholat yang kadang antara santri satu dengan yang lain berbeda tidak menjadi soal. Gerakan mana yang mereka pakai kami terima semuanya apabila ada dalil atau nashnya yang bisa dipertanggungjawabkan”.

Berbicara mengenai Kalimatun Sawa’ beliau berpendapat bahwa dalam konteks multikultural dan pluralisme, menciptakan kehidupan yang damai dan sakinah itulah yang dinamakan sawa’. Namun terdapat persyaratan yaitu harus sesuai dengan konsep-konsep akidah. Sebagai umat Muslim kita diwajibkan komitmen terhadap syariat dan akidahnya. Tidak ada kompromi apapun terhadap kemusyrikan dan kemaksiatan. Lebih lanjut dalam sorotan terhadap perkembangan Islam beliau berpendapat, “Saat ini posisi Islam sulit, karena ketika kita komitmen terhadap agama dikatakan fundamentalis, kalau lunak terhadap agama ya tidak bisa jalan”. Dipaparkannya seperti

hukum zakat dan sedekah yang kurang dikaji secara mendalam oleh umat Islam sendiri mengakibatkan banyaknya ketimpangan secara ekonomi di negara ini. Karena jika umat Islam di Indonesia mau menjalankan hukum zakat dan sedekah secara benar, masalah kemiskinan bisa di atasi. “Selama ini hanya ada undang-undang untuk yang membagikan zakat namun tidak ada undang-undang yang berzakat, belum ada ahli syariah yang memikirkannya”, ujar beliau. Dicontohkan kembali oleh suami Mukarramah ini tentang hukum pidana yang sebenarnya sangat mudah dalam Islam itu sendiri. Menurut beliau, jika prinsip hukum Islam itu dijalankan dengan benar maka bangsa ini tidak perlu penjara, siapa yang salah wajib dihukum. Dalam pemahaman beliau, hukuman itu berfungsi untuk menjaga agar jangan sampai yang berbuat tidak mengulangi perbuatannya dan bagi yang melihat tidak ikut-ikutan melakukannya. Maka hukum qisas, pencurian, jinayat, tandzir harus dijalankan. “Orang mencuri, aturannya sudah pas atau belum kalau sudah ya potong tangan.

Bukannya dipenjarakan, kalau penjara nanti kasihan keluarganya, dalam Islam tidak ada dipenjarakan. Namun yang berhak menjalankan hukum itu hanya Negara, jadi tidak bisa kita memberlakukannya di pondok. Hukuman bagi santri yang bersalah adalah sangsi peringatan atau dikeluarkan begitu”, jawab Ustadz yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Majelis Mujahidin ini.

Menutup pembicaraan, Ustadz yang berpembawaan tenang dan bersahaja itu menceritakan pengalaman organisasi beliau saat di HMI yang sempat menjabat posisi ketua hanya dalam kurun waktu lima menit. Karena kala itu HMI menentang keputusan Presiden RI, kala itu dijabat oleh Soekarno yang membagi azas Pancasila menjadi perasan-perasan kecil, saat sebelum meletusnya G 30 S PKI. “ Waktu itu yang melantik saya adalah Yusuf Syakir dan Bedu Amang sebagai ketua Badko, setelah dilantik dan disahkan, dari Jakarta keluar keputusan untuk memberhentikan kami, jadi hanya lima menit saya menjabat”, ujanya sambil melepas tawa. □

Natangsa Surbakti

PURPUR SAGE, JALAN REKONSILIASI MELALUI INSTITUSI LOKAL



Pluralisme hukum adalah suatu hal yang melekat pada struktur masyarakat Indonesia yang majemuk. Kehadiran pluralisme hukum dalam pranata sosial masyarakat tersebut dapat dirujuk pada pengakuan negara terhadap legalitas sumber-sumber normatif di luar hukum positif. Hukum adat dan agama adalah contoh dua sumber normatif yang diakomodasi negara dalam pranata hukum masyarakat, meski harus diakui bahwa eksistensi pluralisme hukum ini tidak bisa dilepaskan dari motif politis kebijakan hukum kolonial pada masa penjajahan.

Derivasi dari kemajemukan hukum yang diakomodasi negara tersebut dapat ditemukan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini merupakan landasan yuridis yang memungkinkan diterimanya model hukum penyelesaian konflik alternatif di luar proses peradilan formal, yang dalam terminologi hukum disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penelitian "Model Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Lembaga *Purpur Sage* dalam Kebudayaan Batak Karo", merupakan salah satu ikhtiar akademik untuk mengungkap keunikan relasi dalam kemajemukan model penyelesaian sengketa alternatif yang biasa ditempuh melalui institusi lokal.

Struktur kekerabatan masyarakat Batak Karo terbagi dalam tiga kelompok, yang dikenal dengan istilah *Dalikan Si Telu* atau *Daligan Si Telu*. Ketiga kelompok kekerabatan tersebut adalah *Sembuyak* atau *Senina*, *Anak Beru*, dan *Kalimbubu* yang berfungsi sebagai *sangkep enggeloh* (kelengkapan hidup) orang Batak Karo. Konsep kekerabatan sejenis ini juga dapat dijumpai dalam sistem kekerabatan Batak lain, seperti *Dalihan Na Tolu*. Klasifikasi masyarakat di atas menggambarkan relasi kekerabatan Batak Karo yang disandarkan pada hubungan darah

(genealogis) dan hubungan perkawinan; *Senina* berkonotasi sebagai saudara semarga, baik dalam satu cabang marga ataupun berbeda cabang marga; *Anak Beru* merupakan pihak keluarga yang menerima anak gadis atau wanita (penerima dara); *Kalimbubu* adalah pihak keluarga asal gadis atau wanita (pemberi dara) dalam perkawinan. Keteguhan kultural masyarakat Batak Karo ini juga terlihat dari kepatuhan yang kuat terhadap adat istiadat beserta institusi-institusinya.

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan komunalisme, mekanisme maupun infrastruktur yang ada dalam masyarakat Batak Karo menekankan aspek harmoni dan kebersamaan, termasuk dalam menghadapi sengketa. Jalan musyawarah (*runggu*) selalu diambil untuk meluruhkan api konflik yang menyala melalui institusi adat, yaitu purpur sage. Lembaga purpur sage merupakan salah satu bentuk ritual upacara tradisional yang dipakai masyarakat Batak Karo, berupa upacara saling memaafkan antar keluarga, atau masyarakat kampung yang bersengketa tentang sesuatu.

Lembaga purpur sage merupakan penjelmaan dari kesadaran alam pikiran kolektif masyarakat Batak Karo yang mengidealisasikan tata sosial harmonis yang terintegrasi dengan norma-norma atau kaidah moral perilaku setiap individu Batak Karo. Kaidah-kaidah moral itu memuat perintah, anjuran, pembolehkan dan larangan. Sosialisasi serta internalisasi norma-norma tersebut

berlangsung secara turun temurun, dari generasi ke generasi, yang disampaikan secara lisan dalam berbagai kesempatan pertemuan keluarga. Rangkaian norma-norma moral yang terhimpun dalam alam pikiran masyarakat Batak Karo dikenal dengan istilah *sumbang si siwah* (pantangan yang sembilan). Kata *sumbang* merepresentasikan makna janggal, salah, keliru, ceroboh, tercela, tidak bermoral, asusila, dan berdosa. Dengan demikian, *sumbang si siwah* mencerminkan sembilan hal yang harus dihindari dalam perilaku sosial adat Batak Karo, karena setiap bentuk pelanggaran atas hal tersebut dapat mencederai harmoni (disharmoni) sistem sosial yang berlaku.

Berdasarkan informasi di lapangan, *sumbang si siwah* yang dimaksud mencakup sembilan hal, yakni *sumbang* dalam bicara, *sumbang* dalam makan, *sumbang* dalam tertawa, *sumbang* pendengaran, *sumbang* duduk, *sumbang* pandangan, *sumbang* dalam menari, *sumbang* berjalan, dan *sumbang* mandi. Secara umum, sikap-sikap *sumbang* dalam cakupan di atas bersifat melanggar kebiasaan atau tata krama sosial. Berpijak pada falsafah *sumbang si siwah* inilah, masyarakat Batak Karo memiliki kewajiban untuk menjaga diri, menghindari perbuatan-perbuatan menyimpang sekaligus meluruskan/membenahi kembali setiap ada peristiwa sosial yang bersifat disharmoni. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah moral merupakan pemicu timbulnya perselisihan, sengketa bahkan

konflik di antara warga masyarakat, baik masih terikat ataupun tidak terikat tali kekerabatan satu sama lain. Jika ini yang terjadi, maka masyarakat Batak Karo sedang menghadapi disharmoni sosial.

Disharmoni sosial yang dilakukan anggota adat berimbas pada lingkungan keluarga, terutama lingkup kerabat dekat dalam cakupan *sangkep enggeloh*. Disharmoni sosial tersebut dapat direfleksikan oleh munculnya kejanggalan-kejanggalan yang dalam tingkat tertentu bisa mengakumulasi serius semacam psikosomatisme.

purpur sage merupakan salah satu bentuk ritual upacara tradisional yang dipakai masyarakat Batak Karo, berupa upacara saling memaafkan antar keluarga, atau masyarakat kampung yang bersengketa tentang sesuatu.

Kejanggalan ini akan menjadi fokus perhatian pihak *sangkep enggeloh*, utamanya pihak *Anak Beru*. Dalam beberapa kasus, *Anak Beru* mengusahakan upaya penyelesaian pelanggaran moral yang terjadi dengan tujuan untuk memulihkan harmoni sosial yang sempat terlukai. Ketika maksud itu dinyatakan pihak *Anak Beru* kepada pihak *kalimbubu* yang sedang dalam perselisihan tertentu, maka proses upacara perdamaian secara adat sedang berlangsung (*purpur sage*). Pernyataan *Anak Beru* biasanya diiringi dengan permintaan kepada kedua pihak *kalimbubu* yang

sedang berselisih untuk bersedia berkumpul bersama pada hari dan tanggal tertentu di salah satu keluarga di lingkungan *kalimbubu* yang dituakan.

Dalam momen demikian, para pihak yang berselisih biasanya sampai pada puncak kesadaran atas akibat dari meletupnya sengketa di antara mereka, sehingga pada akhirnya mereka merasa menyesal disertai kesediaan berdamai, saling memaafkan, dan berjanji untuk rukun kembali. Proses perdamaian yang telah sampai pada tahap pengakuan dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk merajut harmoni sosial berarti menandai puncak ritual upacara *purpur sage*, untuk kemudian dilanjutkan makan bersama.

Pesan yang terkandung dalam praktik lembaga *purpur sage* adalah rekonsiliasi dan perdamaian berbasis institusi lokal. Eksperimentasi lembaga *purpur sage* pada kenyataannya tidak hanya diperuntukan bagi penyelesaian sengketa masyarakat Batak Karo secara eksklusif, namun model ini cukup efektif dalam mendamaikan perselisihan yang mengemuka antara kelompok warga desa yang beretnis Jawa dan warga beretnis Batak Karo. Spirit rekonsiliasi yang diusung *purpur sage* ini merupakan salah satu potensi penting bagi pengembangan dan reformasi sistem hukum nasional yang selama ini dirasa kering dari sentuhan-sentuhan substansitif keadilan. Pada akhirnya, negara harus memberi ruang pengakuan yang sama terhadap eksistensi pluralisme hukum lokal sebagai model alternatif untuk memberi keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia yang multietnik. □ (riza)

TANTANGAN KEADILAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT MUSLIM

Persoalan ketidakadilan terutama yang bersentuhan dengan perbedaan etnis, agama, ras, dan jender di negeri ini telah menarik picu sikap fanatisme kelompok, yang berpotensi untuk berkembang menjadi permusuhan yang mengakibatkan konflik dan kerusuhan.

Beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim yang memiliki keanekaragaman etnis, agama dan ras seperti Indonesia, menghadapi kerawanan konflik lintas batas. Stabilitas nasional menurun seiring surutnya pamor semangat Bhineka Tunggal Ika karena permasalahan ketidakadilan sosial yang menghantui.

Persoalan ketidakadilan terutama yang bersentuhan dengan perbedaan etnis, agama, ras, dan jender di negeri ini telah menarik picu sikap fanatisme kelompok yang berpotensi untuk berkembang menjadi permusuhan yang mengakibatkan konflik dan kerusuhan. Hal ini menarik sekaligus menantang untuk dikaji terutama untuk mencari alternatif solusi atas kondisi nasional yang carut marut.

Melihat pentingnya upaya menelusuri penyebab ketidakadilan sosial dan solusinya, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS menyelenggarakan seminar bertema "Tantangan Keadilan Sosial Masyarakat Muslim" pada tanggal 20 Februari 2004

di ruang seminar Pasca Sarjana UMS dengan pembicara utama Kemala Chandrakirana.

Kemala memulai paparannya dengan reformasi yang digulirkan di Indonesia, sebuah masa transisi yang tidak terjamin, serta kerusuhan di Maluku dan beberapa daerah lain (dengan korban terbesar adalah wanita dan anak-anak) yang ternyata bukan karena perbedaan visi tentang Indonesia baru atau perbedaan analisis yang menentang rezim Orde Baru, namun merupakan pertikaian antara Muslim melawan penganut Kristen, penduduk asli melawan migran, serta agen "negara kesatuan" dan kaum separatistis yang tidak mau lagi menjadi bagian dari apa yang mereka alami sebagai "Indonesia" yang menekan dan brutal, yang mana mereka semua adalah penduduk yang telah bertetangga secara turun temurun. Semua itu memberikan pesan bahwa identitas penduduk yang berupa agama, etnik, dan ras telah menjadi penyebab kerusuhan yang terjadi di negara yang memiliki 300 kelompok *ethno-linguistic* dengan populasi sebanyak 200 juta jiwa lebih ini.

Latar belakang lain adalah ketakutan penduduk pada “tetangganya” yang menjadi sumber energi dari kerusuhan yang mengerikan itu, dan sekaligus mudah dimanfaatkan sebagai objek penyalahgunaan “politik takut” oleh aktor politik yang punya tujuan tertentu yang diproduksi oleh rasa ketidakadilan yang mendalam dan menyakitkan.

Menurut pengamatan Kemala, ada tiga penyebab ketidakadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. *Penyebab pertama* adalah melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, meskipun angka total kemiskinan mutlak menurun. Gap ini ditunjukkan oleh realitas pengambilan lahan penduduk untuk perusahaan dan pabrik besar, serta penebangan hutan yang memberi pemasukan pada negara, perlakuan yang buruk terhadap buruh ketika ekonomi terindustrialisasi, penggerogotan aset milik penduduk oleh praktek korupsi dan pengancaman, dan belum teratasinya krisis ekonomi di kalangan masyarakat miskin sehingga semakin banyak wanita yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri sebagai buruh migran. *Penyebab kedua* adalah kesalahan peradilan. Dalam mengatasi ketidaksepakatan antara warga, mengakhiri kebebasan pelaku kriminal dan kekerasan terhadap buruh, telah terjadi proses peradilan yang

kurang adil ketika administrasi peradilan tergantung pada pejabat tertinggi atau kekuatan pemegang kekuasaan politik. *Penyebab ketiga* adalah praktek otoritarian rezim Orde Baru berupa tekanan politik terhadap penentang (termasuk kelompok Muslim radikal yang menentang kebijakan otoriter Orde Baru), diskriminasi sistematis terhadap minoritas

Orde Baru telah mewariskan potensi konflik berupa tekanan politik terhadap penentang (termasuk kelompok Muslim radikal yang menentang kebijakan otoriter Orde Baru), diskriminasi sistematis terhadap minoritas (termasuk Cina) serta kekerasan vulgar terhadap buruh yang dianggap mengancam keutuhan negara.

(termasuk Cina) serta kekerasan vulgar terhadap buruh yang dianggap mengancam keutuhan negara.

Dari permasalahan tersebut, Kemala berkesimpulan setidaknya ada empat tantangan yang harus dijawab untuk menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Tantangan pertama adalah mengatasi sumber ketidakadilan ekonomi, sosial, perundangan dan politis. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan dengan cara memunculkan sebuah paradigma baru perkembangan sosial

ekonomi, mereformasi institusi perundangan, serta menuntut pertanggungjawaban atas ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi. Namun begitu, langkah ini belum cukup karena belum memperhatikan ketegangan inter-etnik dan inter-agama yang menyebabkan kerusuhan besar-besaran di masa pasca Soeharto. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengapa ekspresi ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik yang muncul justru kerusuhan antar agama, etnik, dan ras. Dalam menjelaskannya, Kemala menggunakan kilas balik ke jaman ketika Orde Baru berkuasa. Menurutnya, saat itu etnisitas dan agama menjadi kontrol birokrasi negara melalui strategi untuk memasyarakatkan dan mengadopsi

karakteristik kultur Jawa (Jawanisasi) agar diterima atau mungkin dipromosikan, atau memberi hak istimewa pada orang Jawa, strategi untuk memfasilitasi promosi yang cepat bagi pejabat pemerintah berdasarkan agama (Islam), serta mengharuskan struktur pemerintahan desa untuk mengikuti struktur pemerintahan desa-desa Jawa yang tidak sesuai dengan komunitas penduduk asli yang diatur dan dipimpin. Semua itu menghasilkan pengistimewaan yang sistematis dalam lini etnis dan agama. Pengistimewaan ini



Corak Batik kaligrafi

kemudian terkombinasi dengan depolitisasi kewarganegaraan di mana tidak ada pengorganisasian secara politis di bawah level daerah dan di luar masa pemilihan (parlemen dan presiden). Institusi agama yang ada pun hanya menjadi sumber untuk menformulasikan ketertarikan kolektif. Selain itu juga terkombinasi dengan militerisasi umum yang memicu perkembangan militansi dalam lini etnis dan agama, termasuk pasukan jihad yang berperang dalam konflik Maluku. Hasil kombinasi pengistimewaan-depolitisasi kewarganegaraan-militerisasi umum ini adalah terbentuknya pematangan bangsa untuk mobilisasi politis di lini agama dan etnis sehingga memuncak pada ketegangan inter-

etnik dan inter-agama.

Tantangan kedua adalah mengembangkan sebuah negeri impian baru dengan dukungan transformasi institusi sosial dan politik, termasuk institusi pemerintahan dari tingkat desa hingga nasional, birokrasi negara, angkatan bersenjata dan polisi, partai politik dan institusi negara melalui jalan yang mengarah pada sebuah "Rezim Toleransi" baru. Menilik memori historis saat Indonesia mampu —meskipun menghadapi pilihan yang sulit — menentukan bahasa nasional (1928), dan ideologi negara (1945), serta terbinanya koeksistensi damai institusi lokal seperti Pela Gandong, membangun rezim toleransi bukan tidak mungkin dilakukan di negeri ini. Cara yang bisa ditempuh

untuk membangun negeri impian tersebut adalah mengatasi persoalan kepemimpinan ketika masyarakat mengartikulasikan perbedaan antara kaum muda-tua, pemimpin lokal-nasional, pria-wanita, memperkuat gerakan sosial lintas batas, dan menggerakkan institusi budaya dan lokal untuk mengatasi masalah agar tidak terjerumus dalam pengkotakan.

Tantangan ketiga adalah memusatkan perhatian pada krisis kepemimpinan untuk menjamin bahwa generasi pemimpin berikutnya bukan merupakan subyek fragmentasi negara dan memiliki kapasitas untuk memimpin lintas batas perbedaan etnis, agama dan ras.

Tantangan keempat adalah berkomitmen penuh pada proses

otonomi daerah sebagai prasyarat proses demokratisasi. Hanya saja, perlu juga mempertimbangkan kedudukan otonomi daerah yang hingga saat ini masih seperti pedang bermata dua. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada tingkat lokal, otonomi daerah ternyata menyebabkan munculnya primordialisme serta menjadi arena konservatisme agama (serta menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling banyak tersingkirkan). Secara politis, otonomi daerah digunakan untuk memecah belah dan merampas daerah seperti yang diaspirasikan oleh separatistis.

Untuk menjawab keempat tantangan tersebut diperlukan adanya kekuatan sosial berupa gerakan sosial. Gerakan sosial di sini adalah perjuangan bersama yang melibatkan masyarakat sipil, para reformer dalam pemerintahan, kekuatan angkatan bersenjata dan polisi. Gerakan sosial bisa menjadi kekuatan untuk

mengusung visi baru yang melahirkan dasar-dasar bagi kepemimpinan baru, sumber energi untuk membuat institusi baru, serta bisa menjadi arena untuk membangun kapasitas dan penguatan yang nyata. Selain itu gerakan sosial juga memungkinkan terbangunnya jembatan yang menghubungkan perbedaan etnik, agama dan ras dalam proses menemukan solusi nyata bagi permasalahan ketidakadilan yang kompleks. Pertumbuhan gerakan sosial yang dinamis akan sangat penting untuk mengartikulasikan arti dari puing-puing bekas kerusuhan (yang perlu diawali dengan keberanian negara) untuk menemukan cara mentransformasi institusi-institusi dan mendefinisikan ulang hubungan negara-rakyat.

Berdasarkan kajiannya sebagai aktivis gerakan perempuan, ia menemukan fakta bahwa perempuan merupakan pihak yang mengalami kerugian terbesar karena kerusuhan dan

Gerakan sosial akan melahirkan kemungkinan terbangunnya jembatan yang menghubungkan perbedaan etnik, agama dan ras dalam proses menemukan solusi nyata bagi permasalahan ketidakadilan yang kompleks.

ekstrimisme agama yang terjadi. Kemala berpendapat bahwa kesuksesan transisi Indonesia sangat tergantung pada kekuatan dan gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial. Ia juga berkomentar bahwa ibarat di persimpangan jalan, Indonesia bisa memilih jalan — suatu versi baru dari rezim Orde Baru, atau sebuah transisi murni ke arah demokrasi, keadilan sosial dan multikulturalisme.

Mengatasi masalah ketidakadilan sosial di Indonesia, bagaimanapun, bukan sesuatu yang mudah, namun usaha yang penuh tantangan dari masa lalu, jebakan serta kelelahan. Jika Indonesia berhasil, hal ini bisa memberikan kontribusi yang besar pada dunia. Namun jika benar-benar gagal, Indonesia akan terisolasi dari penduduk dunia yang sama-sama berjuang untuk keadilan sosial dalam komunitas multikultural. □

Asih Istikomah





HALAQAH TARJIH III, MENUJU MUSLIM BERWAWASAN MULTIKULTURAL



KS, Solo

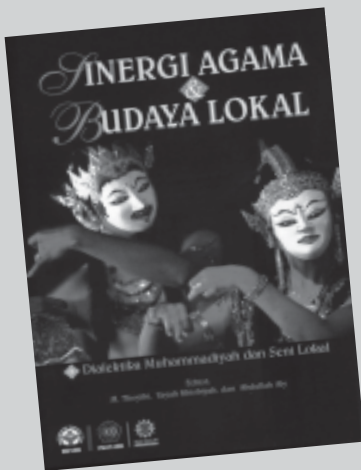
Sebagai upaya membuka ruang diskursus, refleksi, kritik, dan pemaknaan kembali sistem nilai keislaman yang diperlukan dalam keberagaman kontemporer, PSB-PS UMS menyelenggarakan Halaqah Tarjih III dengan tema "Menuju Muslim Berwawasan Multikultural". Pertemuan yang berlangsung tiga hari, tanggal 16-18 Januari 2004 di Hotel Sahid Kusuma Surakarta ini ditujukan untuk memproduksi gagasan dan konseptualisasi Islam Multikultural melalui berbagai pendekatan tauhid sosial, falsafah dan syariah sebagai basis legitimasi dan pencerahan bagi keberagaman yang arif dalam konteks multikulturalisme, serta untuk membangun komitmen bersama untuk mempromosikan sikap keberagaman yang multikulturalis di tengah kecenderungan pengerasan sikap dan eksklusivitas pola pikir masyarakat.

Halaqah yang diselenggarakan menggunakan metode seminar, workshop dan diskusi melingkar ini

dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama membahas Islam dan multikulturalisme dalam perspektif tauhid sosial dengan Moeslim Abdurrahman dan Haidar Bagir sebagai pembicara. Sesi kedua membahas Islam dan multikulturalisme dalam perspektif falsafah dengan pembicara Mulyadhi Kertanegara serta Lies-Marcoes Natsir. Dalam sesi ketiga tentang Islam dan multikulturalisme dalam perspektif syariah, Samsu Rizal Panggabean dan Fathurrahman Djamil hadir sebagai pembicara.

Dua target kegiatan yang dihadiri 37 peserta dari kalangan organisasi Muhammadiyah, universitas dan media massa ini adalah: pertama, lahirnya kesadaran individu akan realitas multikulturalisme yang akan mengakumulasi dalam bentuk kesadaran kolektif untuk hidup bersama secara berbeda; kedua, terpetakannya respon dan upaya warga Muhammadiyah dalam memberikan landasan tauhidi, falsafah dan syar'iyah terhadap realitas dan tantangan multikulturalisme. (Asih)

PSB-PS UMS TERBITKAN, LUNCURKAN DAN BEDAH BUKU BARU



KS, Solo

Sebagai perwujudan program kerjasama eksternal yang telah diagendakan, PSB-PS UMS telah menerbitkan beberapa buku baru dan bulletin, meluncurkan dan membedah buku.

Tiga buku yang telah diterbitkan berjudul *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, cetakan II tahun 2003 (pengantar: M. Amin Abdullah, Zakiyuddin Baidhawiy dan Mutahharun Jinan sebagai editor) hasil kerjasama dengan Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah dan The Ford

Foundation; buku *Sinergi Agama dan Budaya Lokal: Dialektika Muhammadiyah dan Seni Lokal*, cetakan I, Maret 2003 (editor: M. Thoyibi, Yayah Khisbiyah, dan Abdullah Aly) yang diterbitkan bersama MUP UMS, Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah yang diluncurkan dan dibedah pada 24 Mei 2003 dengan pembicara: Moeslim Abdurrahman, A. Charris Zubair dan M.A. Fattah Santoso, serta buku dengan judul *Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara Jawa: Muhammadiyah dan Seni Lokal*, cetakan I, Juni 2003 (pengantar: Abdul Munir Mul Khan, penulis: Asyuri Chamim, Syamsul Hidayat, M. Sayuti dan Fajar Riza Ul-Haq). Selain itu PSB-PS UMS juga telah menerbitkan bulletin *Kalimatun Sawa'* edisi Mei 2003. **(Asih)**

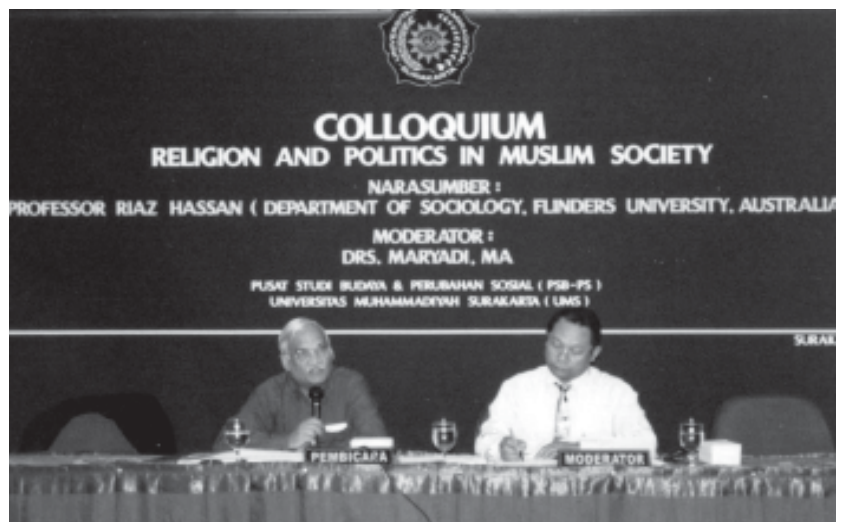
RIAZ HASSAN PAPARKAN HUBUNGAN AGAMA-POLITIK DI UMS

KS, Solo

Dalam *Colloquium* yang diselenggarakan PSB-PS UMS pada 26 Maret 2004 di ruang seminar Fakultas Ekonomi UMS yang bertemakan "Hubungan Agama-Politik", Riaz Hassan, professor pada Department of Sociology, Flinder University, Australia yang hadir sebagai pembicara mengungkapkan hasil penelitiannya di tujuh negara Muslim (Pakistan, Indonesia, Mesir, Kazakhstan, Iran, Turki dan Malaysia) mengenai kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi kunci Negara, institusi keagamaan (ulama, imam masjid, ustadz), institusi pemerintahan (parlemen, pengadilan, pelayanan umum), media massa (pers, TV), perusahaan besar, dan institusi aka-

demik (universitas dan kaum intelektual).

Berdasarkan temuannya, Riaz yang hadir bersama istri, mengatakan bahwa kepercayaan kepada institusi keagamaan berbanding lurus dengan kepercayaan terhadap pemerintahan. Semakin tinggi kepercayaan pada agama, semakin tinggi pula kepercayaan pada negara. Sedangkan keunikan yang terjadi di Indonesia, menurutnya, institusi keagamaan lebih dipercayai daripada institusi pemerintahan, namun demikian kepercayaan kepada pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan di negara-negara lain yang diteliti.



Sebagaimana disampaikan PR I UMS, H. Maryadi sebagai moderator sekaligus penerjemah, *Colloquium* yang dihadiri 33 peserta dari kalangan akademisi, pers dan mahasiswa ini menghasilkan beberapa simpulan, antara lain bahwa maju mundurnya suatu negara sangat tergantung pada hubungan antara agama dan politik; bahwa perberlakuan Negara Islam belum tentu baik bagi kondisi suatu negara karena keterpisahan maupun ketidakterpisahan antara agama dan negara bisa menimbulkan dampak yang baik, namun bisa juga berdampak buruk. **(Asih)**



ROAD SHOW FOR ACEH UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK YANG MEMENUHI PRINSIP KEMANUSIAAN

KS, Solo

Saat ini belum ada rencana yang jelas untuk mengatasi permasalahan Aceh. Demikian dikemukakan Yayah Khisbiyah saat membuka *Road Show for Aceh* yang diselenggarakan PSB-PS UMS pada 4 Maret 2004 di Auditorium UMS.

Kegiatan hasil kerjasama PSB-PS UMS dengan ATMA (Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat) dan SHMI (Suara Hak Asasi Manusia) ini mengusung tema "Penyelesaian Konflik Aceh yang Memenuhi Prinsip Kemanusiaan". *Road Show* diawali dengan pemutaran film dokumenter tentang keadaan masyarakat Aceh ketika dan pasca DOM, dilanjutkan seminar umum dengan Hilmar Farid dan Bonar Tigor Naipospos sebagai pembicara.

Hilmar yang tampil sebagai pembicara pertama menjelaskan bahwa selama ini masih terjadi kekurangtepatan dalam pemahaman konflik yang terjadi di Aceh. Hilmar kemudian memaparkan sejarah

Aceh dengan harapan para peserta berjumlah 145 orang yang hadir akan bisa menempatkan permasalahan dengan tepat. Adapun Bonar menyampaikan makalah berjudul *Memandang Aceh dalam Perspektif Internasional*. Bonar berpendapat, wajib bagi seseorang untuk peduli pada permasalahan yang dihadapi orang lain, termasuk yang berada di tempat lain, dan kita jangan langsung berprasangka buruk terhadap perhatian luar negeri terhadap kasus Aceh.

Road Show yang terlaksana selama sekitar lima jam ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan, sebagaimana disampaikan Natangsa sebagai moderator seminar, bahwa konflik Aceh terjadi karena *mis-management* pemerintahan yang bersumber dari pemerintah pusat. Adapun dua alternatif solusi konflik Aceh yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dihapuskannya DOM serta perlunya solusi damai. (Asih)



LIMA RATUS SISWA SEKOLAH DASAR SEMARAKKAN PENTAS SENI PAS

KS, Solo

Sekitar lima ratus siswa dari empat sekolah dasar: MI Muhammadiyah Karanganyar; SD Muhammadiyah 1 Surakarta; SD Al-Irsyad Surakarta, dan SD Al-Islam 2 Surakarta tampil menyemarakkan pentas seni Pendidikan Apresiasi Seni (PAS) di pendopo STSI Surakarta pada hari Minggu, 7 Maret 2004. Kegiatan terselenggara atas kerjasama PSB-PS UMS dan STSI Surakarta.

Masing-masing sekolah dasar menampilkan kolaborasi tiga macam kesenian yaitu karawitan (termasuk rebana), pedalangan serta tari yang telah diberikan melalui PAS selama satu semester. Penampilan para siswa kelas dua, empat dan lima yang bukan hanya anak-anak etnis Jawa, namun juga Arab dan Tionghoa tersebut cukup memukau tamu undangan dan para hadirin yang memadati tempat acara berlangsung.

Sebagaimana disampaikan Yayah Khisbiyah, PAS dan pentas ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk menumbuhkan kreativitas, mengenalkan budaya dan menumbuhkan kecerdasan spiritual. Acara ini juga diharapkan dapat mengingatkan bahwa selain sebagai *Homo Sapiens*, anak adalah juga *Homo Ludens* (mahluk bermain) yang tak hanya membutuhkan IQ, namun juga SQ.

Beberapa hadirin yang ditemui KS saat acara berlangsung menyambut positif kegiatan PAS dan pentas seni ini. (Asih)

LSB-PDM KABUPATEN KLATEN UNDANG PSB-PS UMS SEBAGAI NARASUMBER

Pada tanggal 22 Agustus 2003, Lembaga Seni Budaya (LSB) PDM Kabupaten Klaten menyelenggarakan kajian dan dialog budaya di kantornya. Dalam kegiatan bertemakan “Muhammadiyah dan Seni Budaya Lokal” tersebut, PSB-PS UMS diwakili oleh Zakiyuddin Baidhawiy berpartisipasi sebagai narasumber.

PSB-PS UMS IKUT SERTA SEMINAR NASIONAL PARIWISATA DAN BUDAYA DI MALANG

Atas undangan Lembaga Kebudayaan (LK) Universitas Muhammadiyah Malang, Zakiyuddin Baidhawiy sebagai perwakilan PSB-PS UMS bertolak ke Malang pada tanggal 27 Agustus 2003 mengikuti seminar nasional Pariwisata dan Budaya yang diselenggarakan di kampus III UMM bertemakan “Peran Seni Budaya Lokal untuk Peningkatan Industri Pariwisata Nasional”.

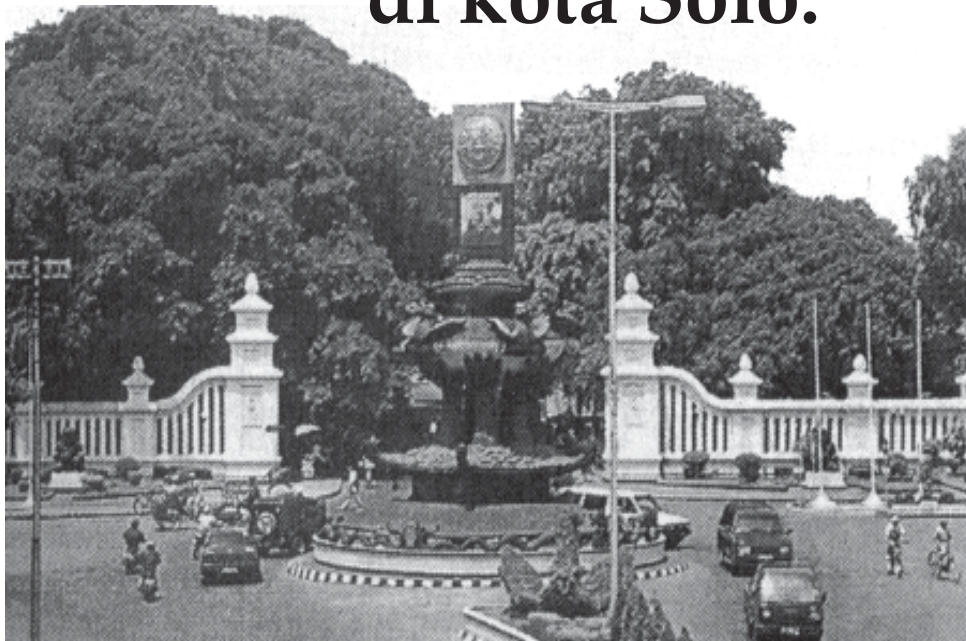
PSB-PS UMS HADIRI FORUM YKP

Dalam rangka berbagi pengalaman tentang Multikulturalisme dan dialog antar keyakinan (*Multiculturalism and Interfaith*) dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa, para pegiat PSB-PS UMS menghadiri forum diskusi dan *sharing* yang diselenggarakan Yayasan Krida Paramita (YKP) di Surakarta. Forum yang diadakan pada tanggal 8 September 2003 ini juga menghadirkan aktivis dari Polandia, Krzysztof Czyewski.

PSB-PS UMS IKUTI SEMINAR FkBA

Pada tanggal 10 September 2003, Almuntaqo Zain sebagai utusan PSB-PS UMS mengikuti seminar bertemakan “*Corporate Culture*” yang diselenggarakan Forum Kajian Budaya dan Agama (FkBA) di gedung UC Universitas Gadjah Mada.

PASAR KLIWON, Perkampungan Etnis Arab di kota Solo.



*Daerah Gladak
sebagai pusat kota
Solo masuk di wilayah
Pasar Kliwon*

Pada edisi kali ini kembali *Buletin Kalimatan Sawa'* menurunkan tulisan tentang sebuah perkampungan yang bernuansa etnis, setelah sebelumnya menurunkan tulisan yang sama tentang perkampungan etnis Tionghoa dan Banjar. Kali ini, reporter KS Ali menurunkan tulisan tentang perkampungan etnis Arab di Pasar Kliwon, Solo.

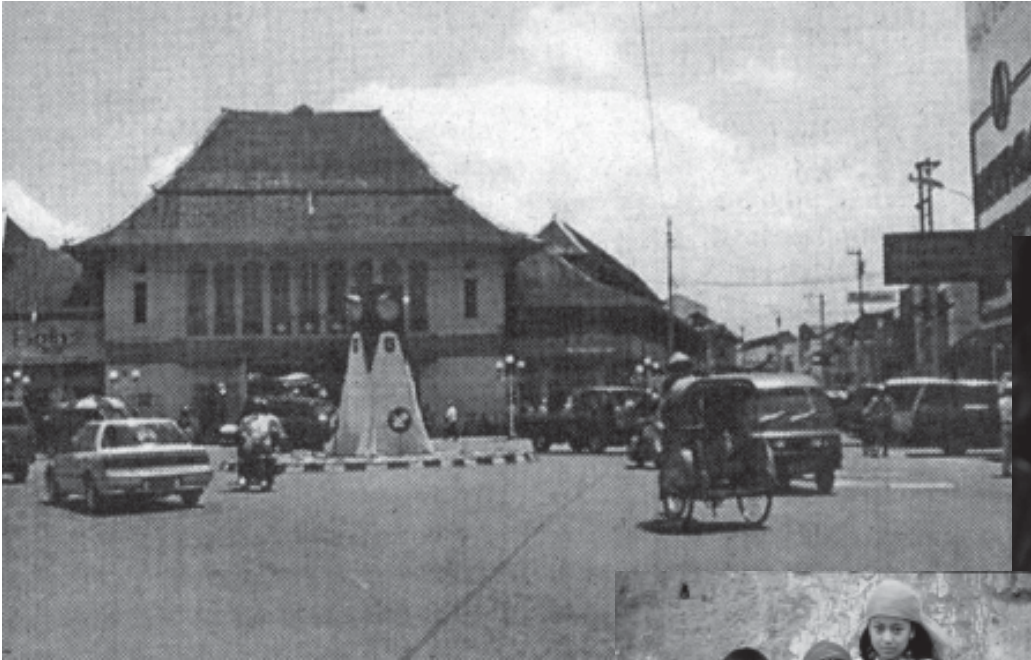
Seiring dengan masuknya Agama Islam di Nusantara pada sekitar abad 13, berkat para pedagang dari Gujarat, seluruh pesisir pantai menjadi tempat subur perkembangan Islam. Tak terkecuali di wilayah Jawa Tengah. Itu pula yang menjadikan para pedagang Islam dari seluruh suku bangsa yang ada menjejakkan kakinya di wilayah ini. Seperti kita telah ketahui, para pedagang Islam ini datang tidak hanya dengan misi dagang namun juga menyebarkan agama mereka. Dalam perkembangannya kemudian agama ini dapat diterima dan bahkan masuk ke dalam kerajaan dan menjadi agama yang dianut oleh para raja.

Bermula dari kerajaan Mataram Islam pada

sekitar tahun 1700-an di Kartasura dan Surakarta, sejak itu pula para bangsa Arab datang dan hidup di kota *vorstenlanden* ini. Letak perkampungan etnis Arab yang tidak jauh dari keraton membuktikan bahwa hubungan harmonis mereka dengan keluarga para raja sudah berlangsung lama.

Hubungan yang mereka jalin adalah hubungan yang saling menghormati. Bangsa Arab dianggap sebagai pembawa agama Islam dan keturunan langsung dari bangsa yang di mana diturunkan agama yang mereka anut. Bangsa Arab menghormati mereka sebagai tuan rumah yang memberikan mereka tempat untuk tinggal dan hidup hingga kini. Itulah pasar Kliwon, sebuah pemukiman yang membentang di sepanjang Jalan Kaptan Mulyadi, Baluwarti, di sebelah Selatan Keraton atau Alun-alun Kidul.

Kelebihan dari kampung ini adalah selain lebih dari 70% warganya adalah keturunan etnis Arab, juga masih terlihat arsitektur lama yang hampir sama dengan kampung-kampung lama yang dihadiahkan



Pasar Gede di suatu sudut tengah kota di kawasan Pasar Kliwon dihuni oleh saudagar-saudagar etnis Arab dan pribumi yang berbaaur harmoni



Generasi muda yang lebih multikultural



oleh raja pada masanya.

Dalam perkembangannya, kampung ini pun tidak lagi hanya dihuni oleh warga keturunan etnis Arab dan Jawa, namun juga oleh orang warga keturunan dari Pakistan. Dan sekitar duapuluh tahun terakhir ada juga warga Tionghoa, walaupun masih terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu.

Seperti yang dituturkan oleh lurah Kedung Lumbu Suwinarno, di daerahnya kini sudah ada tiga etnis yang berdomisili, yaitu etnis Arab, Jawa, dan etnis Tionghoa di sebelah utara.

Walaupun pola pemukiman mereka masih terkotak-kotak tapi tidak menunjukkan adanya masalah yang besar. Hal itu

terbukti ketika terjadi kerusuhan pada tahun 1998, yang merambah menjadi kerusuhan yang bersentimen SARA, wilayah ini terhindar dari kekacauan.

Kegiatan Etnis Arab

Sesuai kebutuhan kehidupan manusia, kegiatan sosial mengharuskan setiap orang untuk terus berhubungan antara satu dengan yang lain. Untuk itu, warga etnis Arab di Pasar Kliwon mendirikan sebuah yayasan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ada beberapa yayasan yang kemudian berkembang menjadi besar. Di antaranya adalah Yayasan al-Irsyad, al-Ihya, dan Majelis Tafsir al-Qur'an. Dua yayasan pertama dikelola oleh

warga keturunan etnis Arab, sedangkan Majelis Tafsir al-Quran atau sering disingkat MTA dikelola oleh warga keturunan Pakistan.

Yayasan al-Ihya dan MTA lebih menekankan pada perkembangan moral masyarakat, melakukan pengajian dan berkembang menjadi lembaga pendidikan, salah satunya adalah SMU MTA. Dan yayasan Al Irsyad berkembang menjadi lembaga yang lebih umum. Bahkan lembaga ini memiliki sebuah radio yang bernama radio ABC. Radio ini tetap memilih bidang syiar Islam, selain juga membawa misi budaya dan Arab. Bahkan radio ini sekarang telah berdiri sendiri, demikian jelas direktur radio ABC Muhammad Tamrin Ghozali yang

asli keturunan Jawa. Kita teringat pula pada sebuah lagu yang bernuansa Timur Tengah berjudul "Cinta Rasul", karya Hadad Alwi, berkolaborasi dengan gadis kecil bernama Sulis.

Betapa seni budaya bisa mempersatukan mereka dari latar budaya yang berbeda. Hadad Alwi seorang pemuda warga keturunan etnis Arab dan Sulis gadis kecil putri dari seorang warga orang biasa suku Jawa. Mereka adalah seorang guru dan murid pada sebuah taman pendidikan al-Quran.

Pola Hubungan Sosial

Pola hubungan sosial kemasyarakatan yang terjadi dari dulu hingga kini telah sedikit banyak berubah. Kalau dulu keturunan etnis Arab dihormati karena hubungan yang sangat erat dengan pihak kerajaan, kini lebih banyak karena kesamaan agama dan mata pencaharian

mereka yang kebanyakan adalah pedagang dan pengusaha batik, konveksi, tekstil. Pola hubungan kerja antara warga keturunan etnis Arab dan Jawa adalah hubungan yang saling menguntungkan antara juragan dan karyawan, dan antara pedagang dan pembeli.

Pola hubungan ini pun lambat laun berubah menjadi hubungan kesetaraan. Dan dalam perkembangannya para warga keturunan etnis Arab ini tidak mau lagi disebut "Arab". Mereka meminta dan lebih senang dipanggil dengan sebutan jamaah, karena menurut mereka, sebutan itu lebih enak kedengarannya, demikian kata seorang tokoh masyarakat warga keturunan etnis

Dulu keturunan etnis Arab dihormati karena hubungan yang sangat erat dengan pihak kerajaan, kini lebih banyak karena kesamaan agama dan mata pencaharian mereka yang kebanyakan adalah pedagang dan pengusaha batik, konveksi, tekstil.

Arab yang enggan disebut namanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola hubungan sosial kemasyarakatan semacam ini terus dijaga oleh para warga di sana, tidak melulu dilakukan oleh para warga keturunan etnis Arab tapi juga keturunan Tionghoa, Jawa dan sedikit suku dari daerah lain negeri ini.

Jika siang hari warga keturunan etnis Arab mendominasi, maka pada malam harinya para pedagang makanan dari suku Jawa mengambil giliran mereka. Perkembangan infrastruktur juga berpengaruh besar, berdirinya Rumah Sakit Kustati mempengaruhi pola kehidupan dan hubungan masyarakat. Pasca kerusuhan 1998, makin menyadarkan masyarakat daerah itu bahwa perbedaan suku bukan suatu hambatan, tapi itu jadi sebuah rahmat dari Allah SWT yang harus disyukuri. □ Ali



Pasar Klewer pusat perdagangan batik yang kebanyakan dikuasai oleh etnis Arab

Keadilan Gender Dalam Perspektif Agama Dan Budaya Masyarakat

Diskursus perbedaan laki-laki dengan perempuan selalu aktual untuk dibicarakan, baik dari sisi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Posisi dan eksistensi kaum perempuan dalam dinamika kebudayaan, haruslah diakui tidak sebaik posisi yang dimiliki para laki-laki. Dikotomi pembagian kerja (*job division*) seringkali secara empirik menempatkan perempuan di sisi sekunder, perempuan cenderung menempati wilayah domestik dan wilayah publik diperuntukkan bagi laki-laki. Sebuah catatan perjalanan *Meeting Gender Justice Wong Sanit Ashram, Thailand 14- 19 Mei 2004, yang dilaporkan oleh Rif'atul Khoiriyah.*

Denyut perjuangan perempuan dalam menempatkan eksistensi dirinya supaya sejajar dengan kaum pria semakin mengabsurd keberadannya. Perlawanan dari kaum wanita seakan menjadi bumerang yang pada akhirnya perjuangan wanita yang menolak segala bentuk eksploitasi, dikriminasi dan kekerasan yang terjadi pada mereka semakin memperbesar billboard wanita sebagai sebuah komoditi masyarakat. Perlawanan tersebut semakin membuat jarak antara laki-laki dan perempuan sehingga pada akhirnya lahirlah kaum feminis yang banyak memproklamirkan dirinya sebagai kaum independen yang tidak membutuhkan kehadiran pria.

Ironis rasanya ketika wanita merangkak untuk meminta kesempatan yang samapun pada

akhirnya terjebak pada sistem yang membuat posisi perempuan terjepit dalam kungkungan budaya dan paham keagamaan. Perempuan yang menginginkan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki adalah bentuk perlawanan terhadap dotrin keagamaan dan terhadap keadiluhungan suatu budaya yang berkembang di masyarakat. Kasus seperti ini berkembang bahkan di negara barat yang notabenehnya adalah negara maju pusat industri dan tehnologi.

Di Asia terutama Asia Tenggara perempuan diperlakukan layaknya barang yang dapat dengan mudah dialihtangankan di bawah kekuasaan feodal dan paham kesukuan. Sementara agama menjadi legitimasi untuk menindas perempuan melalui praktik kebudayaan dan tradisi masyarakat yang berkembang.

Budaya patriarki salah satunya terbentuk karena adanya paham gender atau paham kelamin yang tumbuh dalam masyarakat kita. Pada budaya ini, kedudukan perempuan menjadi *second class* dari laki-laki. Struktur dari masyarakat patriarki ini mengandung tiga asumsi dasar. Pertama, manusia awal adalah laki-



laki; dan perempuan diciptakan darinya, sehingga ia adalah makhluk sekunder. Kedua, meskipun perempuan adalah makhluk kedua dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama yang berbuat dosa, dialah yang menggoda Adam sehingga terusir dari surga. Ketiga, perempuan bukan saja dari laki-laki tetapi untuk laki-laki. Adanya ketiga asumsi ini berakibat pada munculnya persepsi bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak dan martabat, kecuali apa yang telah disediakan kaum laki-laki. Kehadiran perempuan di dunia ini bersifat instrumental bagi kepentingan laki-laki, dan bukan fundamental.

Budaya patriarki secara doktrinal banyak dipengaruhi oleh faham keagamaan. Tradisi Hindu yang berkembang di Pakistan misalnya, untuk status perempuan dikaitkan dengan status sosial, perempuan adalah teman seorang laki-laki (Sumangali Manual bab 1,4). Perempuan ideal ialah *sati*, yaitu perempuan yang sudah menikah (*sumangali*), siap berkorban

untuk suami, membawa keberuntungan bagi suami agar mencapai tujuan hidup manusia, yaitu: *dharma* (kewajiban), *artha* (kesuburan dan kekayaan), serta *kama* (kenikmatan seksual).

Kasus yang lebih mengerikan yang terjadi pada perempuan muslim Pakistan adalah adanya tradisi stereotype Karo Kari, yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan yang berlebih pada perempuan. Perempuan menjadi tumbal akan sebuah nama baik keluarga. Tak sedikit wanita-wanita tak berdosa harus rela untuk menyerehkan kegadisannya untuk mempertahankan nama baik keluarga.

Varahamihara, hukum agama yang ada pada abad ke-6 menyatakan bahwa *dharma* dan *artha* tergantung pada perempuan, dari mereka laki-laki diberi *kama* dan memberkati anak laki-laki. Dengan fungsi tersebut otomatis perempuan tidak pernah bisa mandiri, sebagai figur ideal mereka dibebani tugas serta tanggung jawab yang berat.

Pada perspektif agama Budha yang mulanya berkonsentrasi pada "kesucian jiwa", telah terpengaruh etika Confusianisme yang memposisikan dominasi laki-laki dengan penentuan garis keturunan pada anak laki-laki. Hal ini terlihat dari perubahan sistem masyarakat Budha di Jepang yang mulanya matrilenial (dipengaruhi oleh Shintoisme kepercayaan kuno Jepang) menjadi patrilenial (dipengaruhi oleh Confusianisme dari Cina). Bahkan menurut Manusmurti, Hukum Manu, status perempuan ternyata dinisbahkan kepada laki-laki.

Secara paralel kesekunderan perempuan juga dapat dilacak pada struktur patriarki dalam Gereja Katolik. Beberapa perikopa dalam Kitab Suci seperti 1 Kor. 14:34-35, di mana perempuan tidak diberi hak untuk bicara dalam jemaat. Apabila perikopa ini diinterpretasikan secara tekstual saja, maka mitos bahwa perempuan bicara dalam pertemuan jemaat tidak sopan akan terus hidup. Seperti ditegaskan lagi dalam 1 Tim 2:8-15. Di sini hirarki laki-laki sangat dominan, perempuan memang terlibat dalam pelayanan tetapi hampir tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan. Walaupun Kitab Suci mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus (Efesus 4:16), namun yang dianggap tubuh hanya laki-laki saja. Pengangkatan Maria sebagai Ibu Gereja belum berhasil mengubah struktur Gereja Katolik.

Relevan dengan legitimasi teologis yang terkesan diskriminatif, Alquran pun tidak terlepas dari bias gender. Sebagai Kitab Suci yang diakui absolut otentik (*hudan li*

an-nas) oleh umat Islam, ditemukan sejumlah ayat yang bersifat maskulin, baik secara filologis ataupun semantik, yang menjustifikasi eksistensi gender. Hal ini tersirat dalam soal-soal kewarisan persaksian, poligami. Bahkan ayat *al-Rijaalu qawwamuna'ala an-Nisa'* (kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan) surat an-Nisa' ayat 34, interpretasi ayat ini sering difahami sebagai doktrin teologis yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Sekalipun menurut Riffat Hassan - tokoh feminis Muslim - melihat kata "qawwamuna" di sini adalah sebuah *term* ekonomis, dan bukan biologis.

Secara epistemologis, beban gender (*gender assignment*) yang terjadi dalam masyarakat - seperti legitimasi-legitimasi teologis -selama ini menurut Kay Deaux dan Mary E Kite dalam "Thinking About Gender", sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan gender (*gender belief*

system) yang mengacu pada serangkaian persepsi tentang kualitas maskulin dan feminin. Sistem ini menyangkut stereotipe perempuan-laki-laki, sikap terhadap individu yang dianggap elemen deskriptif dan preskriptif, yaitu kepercayaan tentang "bagaimana" seharusnya laki-laki dan perempuan itu.

Mengacu pada fenomena sosial, atas sistem pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan, yaitu relasi yang berhubungan pada struktur masyarakat nomaden di padang pasir, yang meniscayakan peran dominan laki-laki, atau dalam masyarakat agraris, yang mulai mengakomodasi kemandirian peran serta perempuan, dan pola hubungan dari masyarakat industrialis, di mana progresifitas sains dan teknologi yang sangat membutuhkan kualitas skill/profesionalitas kesetaraan laki-laki dan perempuan pada setiap sektor kerja, maka anggapan baku supremasi laki-laki terhadap

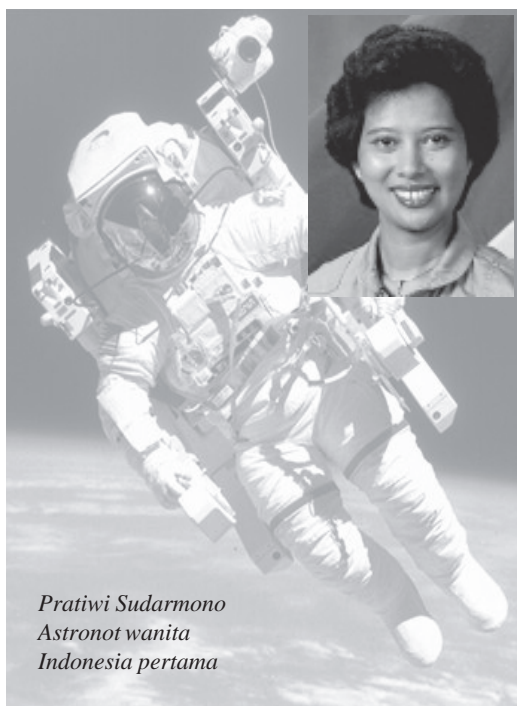
perempuan dengan menyandarkan atas legitimasi doktrin teologis, perlu untuk kaji ulang.

Secara umum dapat dikatakan, legitimasi dari doktrin teologis tentang relasi (kemitraan) laki-laki dan perempuan terkesan diskriminatif. Hal ini disebabkan oleh ajaran-ajaran agama tersebut diformulasikan dan ditransmisikan dalam konfigurasi budaya masyarakat patriarkhi. Selain itu mayoritas dari teks-teks keagamaan pada masa formatif agama-agama dikodifikasi oleh para ulama

yang berjenis kelamin laki-laki. Dari salah satu asumsi itu, emansipasi dan diskursus tentang gender menjadi isu sentral belakangan ini di berbagai negara.

Relasi (kemitraan) ini bukan sesama manusia *an sich*, ia juga merengkuh dunia mikrokosmos, makrokosmos, dan Tuhan. Beberapa istilah Alquran diderivasi dari pola kemitraan ini, misalnya pada surat al-Thariq, "langit dan bumi" diumpamakan sebagai suami dan isteri. Konsep tersebut merupakan kritik terhadap pola hidup masa pra-Islam yang bercorak kesukuan. Promosi karier hanya bergulir di antara laki-laki, sedang pada pola Ummah, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk memperoleh kesempatan secara fair. Karena itulah, Alquran bersifat holistik dan egalitarian. Nasaruddin Umar, memberikan peringatan untuk kehati-hatian dalam memahami relasi seksual dan relasi gender. Menurutnya di dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, kita sering mencampuradukkan dua kategori yang jelas berbeda.

Harus diakui, paradigma emansipasi dan ideologi gender, merupakan studi yang menarik, terutama jika itu selalu dikaitkan dengan legitimasi dari doktrin teologis. Menyongsong era millenium ke 3 ini kita akan dihadapkan secara sporadis pada arus keterbukaan (globalisasi). Sudah saatnya agenda-agenda ini menjadi bahan kontemplasi ulang untuk menata pola kemitraan yang harmonis (*mawaddah wa rahmah*) antara laki-laki dan perempuan, tanpa menafikan fungsi satu dan lainnya yang bersandarkan pada legitimasi-legitimasi apapun. □



Pratiwi Sudarmono
Astronot wanita
Indonesia pertama

